

PENGARUH INTERNAL AUDIT DAN PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PADA PT BUMI KARSA MAKASSAR

Diajukan oleh :

AULIA MAGFIRAH CAHYANI

4516013096



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Internal Audit dan Penerapan Prinsip GCG Terhadap Pencegahan *Fraud* pada PT Bumi Karsa Makassar

Nama Mahasiswa : Aulia Magfirah Cahyani

Stambuk/NIM : 4516013096

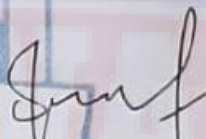
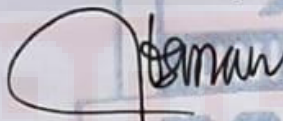
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA.

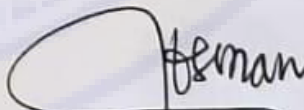
Dr. Seri Suriani, SE., M.Si.

Mengetahui dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa**

**Ketua Program Studi
Akuntansi**

Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH. Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA.

Tanggal Pengesahan:

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Magfirah Cahyani
NIM : 4516013096
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : Pengaruh Internal Audit dan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada PT Bumi Karsa Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya tulis ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 29 September 2020

Mahasiswa yang bersangkutan



Aulia Magfirah Cahyani

ABSTRACT

Aulia Magfirah Cahyani.2020. The Effect of Internal Audit and Application of Good Corporate Governance on Fraud Prevention at PT Bumi Karsa Makassar supervised by Mr. Firman Menne and Mrs. Seri Suriani.

The purpose of this research is to find out the influence of internal audit and the application of good corporate governance to the prevention of fraud pad apt bumi karsa max. The study used a sample of 30 respondents. In sampling, researchers used probability sampling techniques with a simple random sampling method. From the data obtained, descriptive statistical tests are performed, data quality tests, classic assumption tests and hypothesis testing.

The results showed that internal audits had a positive and significant effect on fraud prevention, while the implementation of the GCG principle had no effect on fraud prevention through partial tests. Meanwhile, internal audit and implementation of GCG principles based on simultaneous tests that have been conducted jointly affect fraud prevention in PT Bumi Karsa Makassar.

Keywords: Internal Audit, GCG Principles, Fraud

ABSTRAK

Aulia Magfirah Cahyani.2020. Pengaruh Internal Audit dan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan Fraud Pada PT Bumi Karsa Makassar dibimbing oleh Bapak Firman Menne dan Ibu Seri Suriani

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh internal audit dan penerapan *good corporate governance* terhadap pencegahan fraud pada PT Bumi Karsa Makassar. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 30 responden. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik *probability sampling* dengan metode pengambilan sampel secara *simple random sampling*. Dari data yang didapatkan, dilakukan uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan penerapan prinsip GCG tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* melalui uji parsial. Sedangkan internal audit dan penerapan prinsip GCG berdasarkan uji simultan yang telah dilakukan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bumi Karsa Makassar.

Kata Kunci: Internal Audit, Prinsip GCG, Fraud

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Untaian puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, serta salam dan shalawat hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul “Pengaruh Internal Audit dan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada PT Bumi Karsa Makassar”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terwujudnya skripsi ini adalah berkat kerjasama serta adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orang yang terhormat:

1. Orang tua yang telah mendoakan, memberikan dukungan moral serta materil serta semangat yang sangat luar biasa kepada penulis serta adik-adik yang juga senantiasa memberikan semangat.
2. Rektor Universitas Bosowa Makassar Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng.
3. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, S.E., M.Si., S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa sekaligus

sebagai Pembimbing 1 penulis yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Seri Suriani, S.E., M.Si selaku pembimbing 2 penulis yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen Jurusan Akuntansi yang dengan ikhlas membagikan ilmunya sehingga mampu menambah wawasan bagi penuli selama masa perkuliahan.
7. Karyawan PT Bumi Karsa yang telah bersedia menjadi objek penelitian dalam penulisan skripsi dan memberikan informasi serta bantuan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman keluarga besar mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu penulis selama menjalani masa perkuliahan.
9. Teman-teman Devi, Abi, Angel, Putri, Ade, Risky, Dewi, Nuzul yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam usaha penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Alya, Andikas, Nirwana, Intan, Ainun, Fuadha, Umma dan Ekki yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu atas segala bantuan, dukungan maupun dorongan sehingga skripsi ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tentu saja jauh dari kesempurnaan baik isi maupun tata bahasanya. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman oleh penulis.

Oleh sebab itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya.

Amin...

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Makassar, 29 September 2020

Penulis



Aulia Magfirah Cahyani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN.....	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Audit	10
2.1.1 Definisi Audit	10
2.1.2 Jenis-jenis Audit	12
2.2 Konsep Internal Audit.....	13
2.2.1. Definisi Internal Audit.....	13
2.2.2. Fungsi Internal Audit.....	15
2.2.3. Unsur-unsur Internal Audit.....	16
2.2.4. Peran Internal Audit	21
2.3 Konsep <i>Good Corporate Governance</i>	23

2.3.1	Definisi <i>Good Corporate Governance</i>	23
2.3.2	Tujuan <i>Good Corporate Governance</i>	24
2.3.3	Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	26
2.3.4	Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	26
2.4	Konsep Pencegahan <i>Fraud</i>	32
2.4.1	Definisi <i>Fraud</i>	32
2.4.2	Jenis-jenis <i>Fraud</i>	34
2.4.3	Faktor Penyebab Terjadinya <i>Fraud</i>	36
2.4.4	Pencegahan <i>Fraud</i>	37
2.5	Kerangka Pikir	43
2.6	Hipotesis	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Daerah dan Waktu Penelitian.....	45
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	45
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	46
3.4	Populasi dan Sampel.....	46
3.5	Teknik Sampling.....	47
3.6	Metode Analisis	48
3.6.1	Statistik Deskriptif.....	48
3.6.2	Uji Kualitas Data	48
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	49
3.6.4	Analisis Regresi Linear Berganda	50
3.6.5	Analisis Koefisien Determinasi.....	50

3.6.6	Uji Hipotesis	51
3.7	Definisi Operasional	52
3.7.1	Variabel Bebas.....	52
3.7.2	Variabel Terikat.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	54
4.1.1	Sejarah Singkat Perusahaan.....	54
4.1.2	Profil Perusahaan.....	55
4.1.3	Struktur Organisasi.....	56
4.1.4	Visi dan Misi Perusahaan	62
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	62
4.2.1	Profil Responden	62
4.2.2	Hasil Penelitian.....	64
4.2.3	Pembahasan	80
BAB IV PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	84
5.2	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 <i>Fraud</i> yang paling banyak di Indonesia pada 2016	1
Gambar 1.2 Jenis lembaga yang paling dirugikan oleh <i>fraud</i>	3
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	43
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	56
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Histogram.....	71
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot.....	72
Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedasitas dengan <i>Scatterlot</i>	73

UNIVERSITAS

BOSOWA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin	63
Tabel 4.2 Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan	63
Tabel 4.3 Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja	64
Tabel 4.4 Hasil uji deskriptif.....	65
Tabel 4.5 Hasil uji validitas internal audit	66
Tabel 4.6 Hasil uji validitas internal audit	67
Tabel 4.7 Hasil uji validitas penerapan GCG.....	67
Tabel 4.8 Hasil uji validitas penerapan GCG.....	68
Tabel 4.9 Hasil uji validitas pencegahan <i>fraud</i>	68
Tabel 4.10 Hasil uji validitas pencegahan <i>fraud</i>	69
Tabel 4.11 Hasil uji reliabilitas data	70
Tabel 4.12 Hasil uji multikolinearitas.....	73
Tabel 4.13 Hasil pengujian regresi berganda.....	75
Tabel 4.14 Pedoman interpretasi koefisien determinasi	77
Tabel 4.15 Hasil uji koefisien determinasi.....	77
Tabel 4.16 Hasil uji secara parsial	78
Tabel 4.17 Hasil pengujian secara simultan.....	80

BAB I

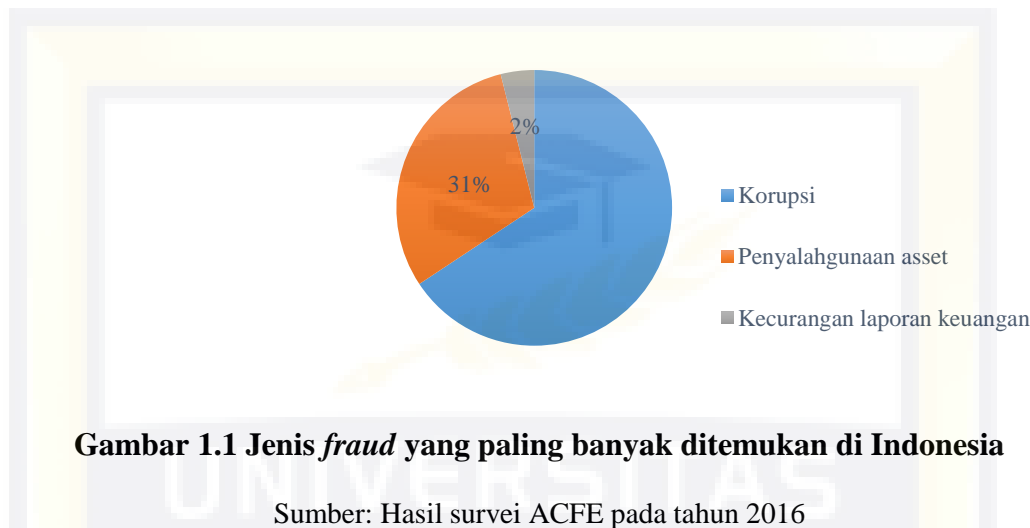
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, sebuah tindakan kecurangan yang seringnya dikenal dengan istilah '*fraud*' sudah menjadi hal yang sulit untuk dielakkan. Tindakan *fraud* sendiri sudah banyak ditemukan baik dalam dunia keuangan ataupun non-keuangan. Tindakan *fraud* sudah dijadikan sebagai masalah yang klasik, bahkan telah mendapat julukan sebagai '*silent killer*' bagi perusahaan. Aktivitas pelaporan dalam transaksi keuangan dalam tiap perusahaan tentunya memiliki perbedaan. Hal tersebut kemudian membuat bentuk pengawasan terhadap tindakan kecurangan ataupun manipulasi terhadap laporan keuangan tentu berbeda.

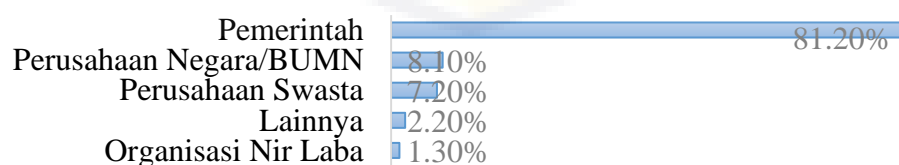
Salah satu lembaga yang menangani masalah *fraud* yang dikenal dengan nama *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mendefinisikan tindakan kecurangan atau *fraud* sebagai salah satu perbuatan yang melawan hukum serta dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Aktivitas perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dilakukan oleh berbagai oknum, baik oknum internal perusahaan ataupun dari luar perusahaan. Tujuan aktivitas tersebut dilakukan tidak lain adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok tetapi menciptakan kerugian bagi pihak lain, baik kerugian langsung maupun kerugian tak langsung. Adanya keuntungan yang diperoleh oleh pelaku maupun kerugian yang diderita bagi perusahaan sebagai akibat dari tindakan kecurangan yang dilakukan pribadi ataupun kelompok

membuat lembaga ACFE melakukan survei di Indonesia pada tahun 2016. Dalam survei yang dilakukan pada tahun 2016, diperoleh kesimpulan bahwa sebanyak



67% responden memilih tindakan korupsi sebagai jenis *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia. Publikasi yang dilakukan oleh media menjadi salah satu alasan mengapa responden banyak memilih tindakan korupsi.

Maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia tentu saja menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak. Dalam survei yang dilakukan oleh ACFE pada tahun yang sama didapatkan bahwa pemerintah dianggap sebagai organisasi yang mutlak dirugikan oleh banyaknya tindakan *fraud*. Kemudian organisasi atau lembaga lain yang dianggap juga paling dirugikan akibat tindakan *fraud* yaitu pada perusahaan negara/BUMN lalu disusul oleh perusahaan swasta, serta organisasi nir laba.



Gambar 1.2 Jenis lembaga yang paling dirugikan oleh *fraud*

Dari hasil survei yang dilakukan oleh ACFE mengindikasikan banyaknya kasus kecurangan yang terjadi serta kerugian yang ditimbulkan di Indonesia membuat *fraud* menjadi perhatian khusus. Tidak hanya dari sektor pemerintahan maupun BUMN yang mengalami kerugian besar akibat tindakan *fraud* tetapi juga dialami pada sektor swasta. Pada sektor pemerintahan maupun BUMN kerugian akibat tindakan *fraud* dicatatkan sebagai kerugian negara, beda halnya dengan kerugian yang terjadi pada sektor swasta. Kerugian yang terjadi pada sektor swasta ditanggung oleh perusahaan itu sendiri.

Kerugian yang ditanggung sendiri oleh pihak perusahaan di sektor swasta tidak jarang mengakibatkan perusahaan menjadi bangkrut apalagi ketika nilai *fraud* yang ditimbulkan cukup besar. Salah satu kasus *fraud* yang pernah terjadi pada perusahaan swasta yang kemudian mengakibatkan perusahaan mengalami kebangkrutan yaitu kasus yang terjadi pada PT Karina Utama Tbk. Pada tahun 2008 sebelum melakukan penawaran umum perdana (IPO) atas 210 juta saham atau setara 25,95% dari modal disetor kepada publik, PT Karina Utama dicurigai telah melakukan tindakan manipulasi terhadap laporan keuangan tahun 2008. Pada perusahaan tersebut juga diketahui terjadi penyalahgunaan dana penawaran umum yang disebabkan karena lemahnya pengendalian internal sehingga pihak manajemen perusahaan hanya merealisasikan sebagian kecil dana hasil penawaran umum, kemudian sisanya diselewengkan oleh pihak manajemen.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, PT Karina Utama terbukti melakukan tindakan *fraud*. Bapepam kemudian memberikan sanksi administratif oleh otoritas bursa sesuai dengan peraturan UU No.8 Tahun 1995 tentang pasar

modal dan delisting dari bursa efek Indonesia setelah sebelumnya saham PT Karina Utama yang berkode “RINA” disuspensi dan tidak akan diperdagangkan kembali. Kasus yang terjadi pada perusahaan kemudian memberikan dampak bagi operasional perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya modal kerja, perusahaan tidak mampu memberikan hak-hak karyawan secara penuh akibat penghentian kegiatan operasional. Salah satu cabang PT Karina Utama yang berada di Kota Medan pada akhirnya melakukan penutupan secara sepihak tanpa adanya penyelesaian hak-hak para karyawan dengan pengorbanan yang telah diberikan kepada perusahaan.

Contoh kasus diatas kemudian memberikan gambaran bagaimana akibat yang ditanggung oleh perusahaan dari tindakan *fraud* yang juga mendatangkan kerugian bagi para karyawan perusahaan tersebut karena apabila perusahaan mengalami kebangkrutan akan menimbulkan tidak terpenuhinya hak-hak para karyawan ataupun kehilangan mata pencaharian bagi karyawan perusahaan tersebut. Banyaknya perusahaan yang kemudian melakukan pelanggaran dan merugikan banyak orang sehingga pemerintah dituntut untuk perlu membuat peraturan dengan tujuan agar mampu menertibkan perusahaan yang ada dan melindungi hak-hak para pihak yang mungkin dapat dirugikan oleh perusahaan dan menjaga perekonomian negara agar tetap stabil. Semua perusahaan diwajibkan untuk mengikuti dan menjalankan peraturan tersebut.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang diwajibkan untuk tiap perusahaan menjalankan dan menerapkan peraturan tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko kecurangan yang dapat terjadi. Peraturan pemerintah dalam

pembentukan dan penyusunan piagam audit internal perusahaan terkait dengan adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 56/POJK.04/2015 mengenai pembentukan dan penyusunan piagam audit internal dan juga bagi perusahaan publik adanya Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal No. SE-03/PM/2000 tentang pembentukan komite audit pada perusahaan.

Dalam mengurangi risiko kecurangan pihak manajemen perusahaan bertanggung jawab untuk merancang serta mengimplementasikan pengendalian internal. Dalam hal ini peran internal audit sebagai unit yang independen dalam perusahaan untuk memantau aktivitas serta memastikan program pengendalian anti kecurangan berjalan efektif dan aktivitas internal audit dapat mencegah sekaligus untuk mendeteksi kecurangan (Ratna Amelia, 2013:42). Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh bagian internal perusahaan itu sendiri untuk mengetahui serta mengawasi sejauh mana penerapan sistem mutu di internal perusahaan berjalan sesuai dengan acuan standar sistem mutu yang diterapkan (Gilang, 2012:12).

Selain audit internal penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dinilai sebagai salah satu aspek penting yang harus diterapkan di perusahaan guna meminimalisir tindakan *fraud*. Penerapan prinsip GCG pada perusahaan baik di sektor BUMN maupun sektor swasta dinilai sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Menteri BUMN No.106 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri BUMN No.23 Tahun 2000 yang mengatur dan merumuskan tentang pengembangan praktik *Good Corporate Governance* dalam

perusahaan perseroan, kemudian disempurnakan dalam KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN.

Corporate governance adalah suatu perangkat yang mengatur tentang tata hubungan yang terjadi diantara manajemen, direksi, dewan komisaris pemegang saham serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan (OECD, 2004). GCG sendiri diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, kewajaran serta kesetaraan. Penerapan GCG di Indonesia sendiri telah dibuatkan pedoman oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) melalui buku yang dirilis pada tahun 2006 yang berjudul "*Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*".

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana fraud dapat dicegah dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Penelitian mengenai pengaruh internal audit dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud di PT Indonesia Aluminium Asahan Kuala Tanjung (Persero). Penelitian ini dilakukan oleh Emi Lestari Barus (2017). Dalam penelitiannya menunjukkan hubungan secara parsial, bahwa audit internal dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Pratomo Cahyo dan Khairina Nur Izzaty (2019) dengan judul penelitian "*Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud*". Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap

pencegahan *fraud*. Hasil analisis penelitian tersebut menunjukkan bahwa GCG dan pengendalian internal terdapat pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada variabel penelitian serta objek penelitian. Peneliti mengganti variabel pengendalian internal menjadi variabel internal audit, sedangkan pada penelitian ini, objek penelitian dilakukan pada PT Bumi Karsa yang merupakan salah satu perusahaan swasta yang ada di Kota Makassar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pengaruh Internal Audit dan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada PT Bumi Karsa Kota Makassar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah internal audit berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bumi Karsa Makassar?
2. Apakah penerapan prinsip *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bumi Karsa Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh internal audit terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bumi Karsa Makassar.

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bumi Karsa Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran dengan maksud mendukung pengembangan teori yang sudah ada. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai bukti empiris atas pengaruh internal audit dan penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud*. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu untuk memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, khususnya ilmu akuntansi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini berguna bagi penulis untuk menambah khasanah pengetahuan khususnya mengenai pengaruh internal audit dan penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian ini juga berguna bagi penulis sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, utamanya yang berkaitan dengan judul yang penulis buat.

- b. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi perusahaan sebagai bahan pelengkap dan juga masukan serta pertimbangan bagi perusahaan, khususnya

yang berkaitan mengenai internal audit, prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud*.

c. Bagi pihak lain

Penelitian ini tentu saja diharapkan memiliki manfaat bagi pihak lain, yaitu dapat dijadikan sebagai dasar referensi bagi pihak lain, khususnya mengenai pengaruh internal audit dan penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Audit

2.1.1 Definisi Audit

Auditing berasal dari kata audit yang merupakan suatu proses evaluasi bukti-bukti secara sistematis yang terkait dengan kegiatan ekonomi dengan tujuan menyandingkan antara bukti dan kriteria yang telah diatur pada standar. Kegiatan audit dilakukan oleh tenaga profesional yang kemudian dikenal dengan sebutan auditor. Seorang auditor diharapkan mampu untuk memberikan pendapat ataupun rekomendasi dari hasil kegiatan audit yang dilaksanakan yang akan digunakan bagi perusahaan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan khususnya mengenai keberlanjutan serta kesehatan perusahaan.

Audit adalah suatu kegiatan mengumpulkan kemudian mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi agar dapat menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan (Arens, 2000:9). Definisi lain audi yaitu suatu proses yang sistematis dengan tujuan memperoleh serta mengevaluasi bukti dengan objektif, yang menyangkut pernyataan mengenai kegiatan sehingga mampu dilakukan penetapan terhadap kesesuaian antara pernyataan dan kriteria (Auditing: *Theory and Practice*, edisi 9, 2001:1-2). Definisi lain dari internal audit juga dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

Sukrisno Agoes (2012:4) menyatakan definisi audit sebagai berikut:

“*Auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Sedangkan definisi audit menurut Mulyadi (2014:11) adalah sebagai berikut:

Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Pengertian audit menurut Hery (2016:10) adalah sebagai berikut:

Auditing didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Dari definisi yang dikemukakan ahli diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa audit adalah pemeriksaan informasi laporan keuangan, catatan-catatan dan bukti-bukti guna memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh orang-orang yang independen dan berkompoten. Fungsi audit sangat penting bukan hanya untuk internal perusahaan, namun juga untuk *stakeholders* perusahaan untuk pengambilan keputusan seperti pemerintah, pemegang saham, analisis keuangan, banker, investor dan masyarakat. Fungsi audit sangat penting, bukan hanya untuk internal perusahaan, namun juga untuk para *stakeholders* perusahaan dalam hal pengambilan keputusan seperti pemerintah, pemegang saham, analisis keuangan, banker, investor dan masyarakat. Keseluruhan pelaksanaan yang dilakukan dalam proses audit ini harus bersifat independen serta sesuai dengan standar audit yang berlaku.

2.1.2 Jenis-jenis Audit

1. Audit laporan keuangan (*Financial statement audit*)

Audit laporan keuangan adalah salah satu jenis audit yang berorientasi lebih terhadap masalah-masalah keuangan. Sasaran dari kegiatan audit keuangan ini mengenai kewajaran terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Hasil dari audit laporan keuangan tersebut selanjutnya didistribusikan kepada para oengguna seperti pemegang saham, kantor pemerintah, dan kreditur melalui laporan yang disajikan auditor atas laporan keuangan yang diaudit.

Audit laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar sangat diperlukan agar dapat memaksimalkan fungsi dalam pasar sekuritas nasional. Audit laporan keuangan juga memiliki peran bagi para investor dan kreditor dalam menurunkan risiko dalam membuat keputusan-keputusan dalam hal investasi dengan tidak menggunakan informasi yang bermutu rendah.

2. Audit kepatuhan (*Compliance audit*)

Audit kepatuhan adalah suatu kegiatan audit yang memiliki tujuan untuk menguji setiap pelaksanaan dalam suatu kegiatan apakah telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ketentuan atau peraturan yang dijadikan dalam audit kepatuhan yaitu peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah/badan/lembaga lain yang terkait dan kebijakan-kebijakan, sistem serta prosedu yang telah ditetapkan oleh direksi (manajemen perusahaan). Audit kepatuhan juga harus didasarkan pada kriteria atau ketentuan yang ditetapkan oleh auditor.

3. Audit operasional (*Operational audit*)

Audit operasional atau audit manajemen adalah audit yang berorientasi pada penilaian mengenai masalah efisiensi, efektivitas serta ekonomis (3E). Hasil dari kegiatan audit operasional memiliki peran untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam suatu perusahaan bisnis, audit operasional mampu mencakup seluruh kegiatan dari suatu departemen ataupun divisi atau fungsi lain yang mungkin menjadi fungsi lintas unit usaha seperti fungsi pemasaran atau pengolahan data. Selain internal auditor, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dapat melaksanakan kegiatan audit operasional ini.

4. Audit kecurangan (*Fraud audit*)

Audit kecurangan atau *fraud audit* merupakan audit yang bertujuan untuk mengungkapkan adanya kejadian atau kegiatan yang mengindikasikan kecurangan baik berupa korupsi, kolusi maupun nepotisme yang akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan bahkan negara, yang memberikan keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Dalam audit kecurangan, internal auditor harus membuat *flow chart* dan jugas modus operandi yang berbentuk uraian tentang berbagai cara yang memungkinkan dalam melakukan tindak kecurangan atau kejahatan.

2.2 Konsep Internal Audit

2.2.1 Definisi Internal Audit

Internal audit merupakan salah satu unit kerja dalam perusahaan. Internal audit bersifat independen dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya

Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap divisi atau bagian, dan mengevaluasi fungsi setiap level untuk pencapaian tujuan perusahaan secara efisien. Audit internal adalah suatu kegiatan *assurance* dan konsultasi yang bersifat independent serta objektif, dirancang dengan tujuan memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi dari sebuah perusahaan. Audit internal berfungsi untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan metode pendekatan yang sistematis dan teratur yang bertujuan untuk mengevaluasi, meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian serta proses *governance*.

Menurut *Institute of Internal Auditors-IIA* (Ikatan Auditor Internal) yang kemudian dikutip oleh Messier (2005:514) memaparkan mengenai definisi audit internal sebagai berikut:

Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan kegiatan operasi suatu organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Definisi lain dari internal audit menurut Sukrisno Agoes (2004:221) adalah sebagai berikut:

Internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah misalnya peraturan bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain.

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa internal audit adalah suatu proses pemeriksaan yang kemudian dikelola secara independen oleh pihak organisasi perusahaan. Internal audit berfungsi untuk menguji dan mengevaluasi antara laporan dan catatan akuntansi organisasi

terhadap kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Audit internal diharapkan mampu untuk membantu para pimpinan perusahaan dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan organisasi.

2.2.2 Fungsi Internal Audit

Fungsi audit internal dalam organisasi bermacam-macam. Fungsi audit internal didalam perusahaan adalah untuk menentukan apakah *internal control* perusahaan sudah baik atau belum, menentukan kehandalan informasi yang telah dibuat oleh pihak manajemen serta untuk menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi atas berbagai kegiatan operasional organisasi (Mulyadi, 2014:14).

Menurut *Institute of Internal Auditor (IIA)* fungsi audit internal pada perusahaan adalah untuk:

1. Membantu melindungi aset dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan penipuan.
2. Meningkatkan efisiensi dalam operasi.
3. Meningkatkan keandalan dan integritas keuangan.
4. Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
5. Menetapkan prosedur monitoring.

Dalam mewujudkan *good corporate governance*, fungsi audit internal sendiri adalah untuk memkasimalkan value bisnis perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip-prinsip GCG.

2.2.3 Unsur-unsur Internal Audit

1. Independensi

Menurut Hiro Tugiman (2010:63) independensi menyangku dua aspek

utama yaitu:

a. Status organisasi

Status organisasi audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk mengetahui atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan. Audit internal haruslah memiliki dukungan dari senior dan dewan, sehingga mereka akan mendapat kerja sama dari pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaan secara bebas dari berbagai campur tangan pihak lain.

b. Objektivitas

Merupakan sikap mental independen yang harus dimiliki oleh auditor internal dalam melaksanakan suatu pemeriksaan. Auditor internal ini tidak boleh menempatkan penilaian yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan penilaian yang dilakukan oleh pihak lain. Dengan kata lain, sikap objektif auditor internal mengharuskan pelaksanaan dengan suatu cara sehingga mereka akan yakin dengan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan dan tidak akan membuat penilaian dengan kualitas yang tidak benar atau meragukan. Auditor internal tidak boleh ditempatkan dalam keadaan yang membuat mereka tidak dapat membuat penilaian yang objektif dan profesional.

2. Kemampuan profesional

Menurut Hiro Tugiman dalam buku Standar Profesional Audit Internal (SPAI) (2006:27-29) kemampuan profesional audit internal adalah tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah orang-orang secara bersamaan atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Adapun cakupan kemampuan profesional yaitu:

a. Bagian audit internal, harus:

1. Membuka jaminan atau kepastian teknis dan latar belakang pendidikan para pemeriksa internal telah sesuai dengan pemeriksaan yang akan di laksanakan.
2. Memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan.
3. Memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal akan diawasi sebagaimana mestinya.

b. Bagi auditor internal, harus:

1. Mengetahui standar profesional dalam melakukan pemeriksaan.
2. Memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan.
3. Memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif.
4. Melaksanakan ketelitian profesional yang sepatasnya dalam melakukan pemeriksaan.

3. Lingkup pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan audit internal menurut Hiro Tugiman (2010:72) meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab.

Lingkup pekerjaan pemeriksaan internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.

a. Keandalan informasi

Pemeriksaan internal haruslah memeriksa keandalan (reabilitas dan integritas) informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan suatu informasi tersebut.

b. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur serta peraturan perundang-undangan.

Pemeriksa internal harus memeriksa sistem yang telah ditetapkan untuk menyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dimiliki akibat penting terhadap pekerjaan-pekerjaan atau operasi-operasi, laporan-laporan serta harus menentukan apakah organisasi telah memenuhi hal-hal tersebut.

c. Perlindungan terhadap harta

Pemeriksaan internal haruslah memeriksa alat atau cara yang digunakan untuk melindungi harta atau aktiva, dan bila dianggap perlu, melakukan verifikasi terhadap keberadaan berbagai harta organisasi.

d. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien

Pemeriksaan internal haruslah menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber yang ada.

e. Pencapaian tujuan

Pemeriksaan internal haruslah menilai pekerjaan, operasi atau program untuk menentukan apakah hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah suatu pekerjaan, operasi atau program telah dijalankan secara tepat dan sesuai dengan rencana.

4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan

Menurut Hiro Tugiman (2010:53) kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindak lanjuti (*follow up*). Adapun pelaksanaan kegiatan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan pemeriksaan

Adapun perencanaan pemeriksaan internal haruslah didokumentasikan dan harus meliputi:

1. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan.
2. Memperoleh informasi dasar tentang kegiatan yang akan dilakukan audit.
Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.

3. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu.
 4. Melaksanakan survey secara tepat untuk lebih mengenal kegiatan yang diperlukan, resiko-resiko dan pengawasan-pengawasan.
 5. Mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa.
 6. Penulisan program pemeriksaan.
 7. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan disampaikan.
 8. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan.
- b. Pengujian dan pengevaluasian informasi

Audit internal haruslah mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut:

1. Semua informasi yang berhubungan dengan tujuan audit dan ruang lingkup kerja harus dikumpulkan.
2. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi.
3. Prosedur pemeriksaan, teknik pengujian dan penarikan contoh yang dipergunakan harus lebih dahulu diseleksi bila memungkinkan dan diperluas atau diubah bila keadaan menghendaki demikian.
4. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap

objektif auditor terus diajag dan sasaran pemeriksaan yang harus dapat dicapai.

5. Kertas kerja audit adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat oleh auditor dan ditinjau atau ditelaah oleh manajemen bagian audit internal. Kertas kerja ini mencantumkan berbagai informasi yang diperoleh dan dianalisis yang dibuat serta harus mendukung dasar temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang akan dilaporkan.

2.2.4 Peran Internal Auditor

1. Peran internal auditor sebagai *watchdog*

Pada awalnya internal audit dikenal sebagai pendekatan berbasis pada sistem yang dalam perkembangan selanjutnya beralih ke audit internal berbasis proses. Pada saat itu audit internal lebih banyak berperan sebagai mata dan telinga manajemen, karena manajemen butuh kepastian bahwa semua kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksankan dengan menyimpang oleh pegawai. Audit internal lebih banyak melakukan pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan para pelaksana terhadap ketentuan-ketentuan yang ada.

Watchdog adalah peran auditor internal yang mencakup pekerjaan menginspeksi, observasi, menghitung, serta melaksanakan kegiatan cek dan ricek (Tugiman, 2006:34). Adapun tujuannya adalah untuk memastikan ketaatan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan organisasi. Oleh karena sifat pekerjaannya, peran internal auditor sebagai *watchdog* biasanya akan menghasilkan rekomendasi yang mempunyai dampak dalam jangka waktu yang pendek.

2. Peran internal auditor sebagai konsultan

Para manajemen melihat bahwa auditor internal selain sebagai *watchdog* juga dapat memberikan manfaat lain berupa saran dalam pengelolaan sumber daya organisasi yang dapat membantu tugas para manajer. Peran auditor internal sebagai konsultan membuat auditor internal untuk dapat selalu meningkatkan pengetahuannya, baik tentang profesi auditor maupun aspek bisnis, sehingga dapat membantu manajemen dalam memecahkan masalah. Menurut Effendi (2002), peran auditor internal sebagai konsultan diharapkan mampu untuk dapat memberikan manfaat berupa nasehat dalam pengelolaan sumber daya organisasi. Peran auditor sebagai konsultan biasanya akan menghasilkan rekomendasi yang bersifat jangka waktu menengah.

3. Peran internal auditor sebagai katalisator

Peran internal auditor sebagai katalisator berkaitan dengan *quality assurance*, sehingga internal auditor diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. Dalam peran katalisator, internal audit bertindak sebagai fasilitator dan *agent of change*. Dampak dari peran katalisator bersifat jangka panjang, karena fokus katalisator adalah nilai jangka panjang (*longterm values*) dari organisasi, terutama berkaitan dengan tujuan organisasi yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) dan pemegang saham (Effendi, 2002:27).

2.3 Konsep Good Corporate Governance

2.3.1 Definisi Good Corporate Governance

Dalam bahasa Indonesia, *Good Corporate Governance* (GCG) seringkali diterjemahkan sebagai tata kelola perusahaan. Secara umum, istilah GCG diartikan sebagai suatu sistem pengendalian dan pengaturan bagi perusahaan, yang ditinjau dari mekanisme hubungan yang terjadi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengurusan perusahaan tersebut, maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terdapat dalam mekanisme pengelolaan itu sendiri.

Menurut *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) yang dikutip oleh Sutojo dan Aldridge (2005:2) menyatakan definisi *corporate governance* adalah sebagai berikut:

Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board* dan pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Good Corporate Governance* yang baik dapat memberikan insentif yang baik bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham serta harus memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.

Budi harta dan Gusnadi (2008:126) juga mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

Corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, para pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Menurut surat keputusan Menteri BUMN Nomor 112 tahun 2002 pasal 1 tentang penerapan praktek *good corporate governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan, guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap

memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, secara singkat GCG dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan untuk mendapatkan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan dalam perusahaan. Hal tersebut terjadi karena GCG dinilai mampu mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan serta profesional. Penerapan prinsip GCG pada perusahaan diharapkan mampu untuk menarik minat investor baik *domestic* maupun investor asing. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi perkembangan perusahaan di Indonesia.

2.3.2 Tujuan *Good Corporate Governance*

Prinsip GCG dalam penerapannya tentu saja memiliki tujuan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai yaitu dapat mengurangi masalah-masalah yang muncul sebagai akibat dari masalah yang ditimbulkan oleh keagenan. Menurut Dedi Kusmayadi (2015:15), implementasi dari sistem GCG tentu diharapkan mampu untuk meningkatkan nilai tambah bagi pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) melalui beberapa tujuan yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang akan memberikan suatu kontribusi yang memicu terciptanya kesejahteraan bagi para pemegang saham, pegawai dan *stakeholder* lainnya, serta merupakan solusi yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan bagi perusahaan dimasa yang akan datang.

2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mengakui serta melindungi hak dan juga kewajiban para *shareholder* dan *stakeholder*.

Menurut Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005:5-6), ada lima tujuan utama penerapan *good corporate governance* yaitu:

1. Melindungi hak dan kepentingan para pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para *stakeholder* non pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Penerapan GCG juga diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya perdagangan orang dalam, akuisisi internal serta terjadinya hubungan istimewa yang akan merugikan pemegang saham minoritas. Apabila semua perusahaan mampu menerapkan mekanisme GCG tentu akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia yang juga akan mempengaruhi pandangan para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

2.3.3 Manfaat *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan *good corporate governance* diharapkan mampu memberikan manfaat. Adapun beberapa manfaat penerapan GCG menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001:4) yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan juga deviden.

2.3.4 Prinsip *Good Corporate Governance*

Dalam penerapannya, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik perlu dibangun serta dikembangkan. Perusahaan harus membangun sistem serta pedoman tata kelola perusahaan yang dapat diterapkan serta dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Adapun prinsip GCG yang dikembangkan menurut *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas dalam *good corporate governance* memuat tentang kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh dewan komisaris serta direksi. Prinsip ini juga berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan haruslah dikelola

dengan benar, terukur serta sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

Akuntabilitas merupakan syarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Adapun tindakan-tindakan yang dapat dilakuakn guna mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam perusahaan menurut Dedi dan Jajang (2015:33) yaitu:

- a. Perusahaan menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*.
 - b. Perseoran menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota dewan komisaris dan direksi, serta seluruh jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
 - c. Perusahaan meyakini bahwa masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan *good corporate governance*.
 - d. Perseroan menetapkan *check and balance* dalam pengelolaan perusahaan.
 - e. Perusahaan memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran perusahaan berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate culture values*). Sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memiliki *rewards and punishment system*.
2. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip pertanggungjawaban menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam *good corporate governance* yaitu mengakomodasikan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemetintah, asosiasi bisnis dan sebagainya. Prinsip pertanggungjawaban ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan seluruh kegiatannya secara bertanggung jawab.

Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat memelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan dalam penerapan prinsip *responsibility* pada perusahaan sebagaimana yang ditulis oleh Dedi dan Jajang (2015:35) adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh bagian dalam perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan.
- b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial, antara lain dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
- c. Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah menerapkan sistem tata nilai dan budaya perusahaan yang dianut perusahaan.

- d. Manajer dan karyawan perusahaan telah bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur maupun ketentuan yang berlaku di perusahaan.
- e. Manajer dan unit organisasi telah melakukan pertanggung jawaban hasil kerja secara teratur.

3. Keterbukaan (*Transparancy*)

Dalam prinsip keterbukaan, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan keuangan perusahaan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus mampu menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Perusahaan haruslah mampu mengambil inisiatif dalam mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh perundang-undangan, tetapi juga dalam hal pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun contoh penerapan prinsip keterbukaan menurut Dedi dan Jajang (2015:37) adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat dibandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.
- b. Perusahaan mengungkapkan informasi tetapi tidak terbatas hanya pada misi, visi, dan sasaran usaha serta strategi perusahaan, kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan, susunan direksi dan dewan komisaris, pemegang saham dan pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan

dan pengendalian internal, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi *good corporate governance* serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan investor.

- c. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholder* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
 - d. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia perusahaan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.
4. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip kewajaran menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham. Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. pemberlakuan prinsip ini pada perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Prinsip kewajaran ini dijadikan sebagai suatu alat untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil diantara beragam kepentingan dalam perusahaan. Prinsip kewajaran juga harus memiliki peraturan dan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara efektif. Hal tersebut dinilai menjadi penting karena dianggap mampu menjamin adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa ada pengecualian. Contoh penerapan prinsip kewajaran dalam perusahaan menurut Dedi dan Jajang (2015:40) adalah:

1. Perusahaan memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* berdasarkan atas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).

2. Perusahaan memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.
3. Perlakuan, pengembangan *teamwork*, hubungan kerja dan pembinaan pada para karyawan akan dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajibannya secara adil dan wajar.
4. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan.

5. Kemandirian (Independency)

Prinsip kemandirian menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai dengan peran dan fungsi yang dimilikinya, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Prinsip kemandirian menitikberatkan kepada para pengelola perusahaan untuk harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholder* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

Untuk terciptanya pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan haruslah dikelola secara independen sehingga diharapkan masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak ada intervensi dari pihak lain. Adapun contoh dari penerapan prinsip kemandirian menurut Dedi dan Jajang (2015:42) adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak berpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan.
- b. Perusahaan mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
- c. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain, sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

2.4 Konsep Pencegahan Fraud

2.4.1 Definisi *Fraud* (Kecurangan)

Menurut kamus bahasa Inggris-Indonesia, kata '*fraud*' diterjemahkan sebagai tindakan penipuan, kecuranganm ataupun penggelapan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa (KBBI), kecurangan memiliki arti yaitu ketidakjujuran dan keculasan. Secara prinsp, definisi *fraud* lebih ditekankan pada konsekuensi hukum seperti penggelapan, pencurian, tipu muslihat, penyalahgunaan wewenang, kecurangan laporan keuangan, dan bentuk kecurangan lainnya yang dapat meruhkan orang lain dan memberikan keuntungan bagi pelakunya.

Definisi *fraud* menurut W. Stave Albercht dan Chad D. Albercht (2012:6) dalam buku mereka yang berjudul '*Fraud Examination*' yaitu:

Fraud adalah suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang dapat digunakan dengan cara kekerasan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar. Tidak terdapat definisi atau aturan yang

dapat digunakan sebagai suatu pengertian umum dalam mengartikan *fraud* yang meliputi cara yang mengandung sifat mendadak, menipu, cerdik dan tidak jujur yang digunakan untuk mengelabui seseorang. Satu-satunya batasan untuk mengetahui pengertian diatas adalah yang membatasi sifat ketidakjujuran manusia.

Definisi *fraud* menurut *Blaks Law Dictionary* yang dikutip oleh Karyaana

(2011) adalah sebagai berikut:

saran penuh lain Kecurangan mencakup segala macam yang dapat dipikirkan oleh manusia dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan yang salah atau memaksakan kebenaran mencakup semua cara yang tak terduga, siasat, licik, tersembunyi dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang tertipu

Definisi lain mengenai *fraud* juga dikemukakan ikeg IIA. Menurut IIA *fraud* adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang dilakukan dengan sengaja.

ACFE (2006) juga mendefinisikan *fraud* adalah tindakan yang berkenan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang atau kelompok dan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. *Fraud* juga mempunyai istilah lain yaitu *illegal act* atau perbuatan melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru kepadapihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang baik di dalam maupun di luar organisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan unsur *fraud* adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum.
2. Dilakukan oleh orang dari dalam maupun luar organisasi.
3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.
4. Merugikan pihak lain baik secara langsung maupun tak langsung.

2.4.2 Jenis-jenis *Fraud*

Association of Certified Examinations (ACFE:200) yang merupakan salah satu organisasi di Amerika, mengkategorikan *fraud* dalam tiga kategori yaitu:

1. Penyalahgunaan aset (*Asset missapropriation*)

Penyalahgunaan aset merupakan salah satu jenis *fraud* yang dapat merugikan perusahaan. Penyalahgunaan aset tentu akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Adanya penyalahgunaan aset tentu mempengaruhi 2 elemen lain yaitu *liability* dan *equity*. Karena kewajiban perusahaan tidak mungkin dicuri dan dilakukan konversi atas kewajiban tersebut, maka yang memungkinkan untuk menjadi objek kecurangan adalah mencuri atau menyalahgunakan aset yang akan berdampak pada *equity*. Adapun tindakan-tindakan yang digolongkan dalam jenis penyalahgunaan aset adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang melibatkan kas (*cash fraud*)
 - b. Penjualan yang tidak tercatat (*unrecorded sales*)
 - c. Penjualan dan piutang yang dibawah nilai
 - d. Pencurian cek
 - e. Penyalahgunaan cek
- ### 2. Kecurangan laporan keuangan (*Financial statement fraud*)

Kecurangan laporan keuangan biasanya banyak dilakukan oleh para manajemen dalam bentuk salah saji material dalam laporan keuangan yang kemudian dapat merugikan investor dan juga kreditor. Kecurangan laporan keuangan juga didefinisikan sebagai suatu kesalahan yang disengaja, pengaburan

fakta-fakta material atau data akuntansi yang menyesatkan, yang kemudian dapat merubah ataupun mempengaruhi keputusan dan penilaian bagi orang-orang yang membaca laporan yang disajikan. Di Indonesia *financial statement fraud* ini lebih banyak dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pajak. Pada umumnya, *financial statement fraud* akan meliputi hal-hal berikut:

- a. Manipulasi, pengaburan atau pemalsuan dokumen-dokumen yang material, dokumen penunjang dalam laporan keuangan.
- b. Kesengajaan untuk membuat salah saji material atas kejadian, transaksi ataupun informasi lain yang digunakan dalam persiapan laporan keuangan.
- c. Secara sengaja salah menerapkan prinsip, prosedur dan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan melaporkan serta mengungkapkan kejadian-kejadian bisnis atau ekonomi dalam laporan keuangan.
- d. Kesengajaan untuk menutupi ketidakbenaran pengungkapan metode akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan.

3. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi adalah perbuatan yang merugikan kepentingan publik/umum atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu (Karvono, 2013:22). ACFE kemudian membagi korupsi dalam empat bagian pokok yaitu penyuapan, perluasan ekonomi, pemberian *illegal*, dan benturan kepentingan.

- a. Penyuapan didefinisikan sebagai perbuatan menawarkan, memberi, menerima sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi keputusan resmi yang diambil. Penyuapan tidak hanya terjadi dalam sektor pemerintahan, tetapi juga terjadi pada sektor swasta.
- b. Pemberian *illegal* dalam skemanya dilakukan bukan untuk mempengaruhi keputusan, melainkan sebagai hadiah dari keputusan yang diambil. Dalam skema suap dan pemberian *illegal* yang berperan adalah orang lain diluar pelaku *fraud*.
- c. Perluasan ekonomi dalam skemanya pelaku meminta sejumlah uang/pembayaran terhadap jasa atau sesuatu yang dilakukan sebagai akibat mempermudah atau mengambil keputusan yang menguntungkan pihak lain.
- d. Benturan kepentingan akan terjadi ketika pegawai, manajer, ataupun eksekutif perusahaan memiliki kepentingan pribadi ataupun kepentingan ekonomi yang dapat mempengaruhi perusahaan.

2.4.3 Faktor Penyebab Terjadinya *Fraud*

Fraud pada umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan dan dorongan dengan memanfaatkan kesempatan yang dimiliki. Faktor lain terjadinya *fraud* juga karena adanya pembenaran atau memawajarkan tindakan tersebut. Valery G. Kumat (2011:139) kemudian menyatakan pendapat tentang faktor yang menjadi pendorong terjadinya *fraud* adalah sebagai berikut:

1. Desain pengendalian internal yang kurang tepat sehingga meninggalkan celah yang beresiko.

2. Praktek yang menyimpang dari kelaziman yang berlaku.
3. Pemantauan atau pengendalian yang tidak konsisten terhadap implementasi *business process*.
4. Evaluasi yang tidak berjalan terhadap *business process* yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cressey (1953) yang kemudian dikenal dengan istilah 'Teori Fraud Triangle' mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan *fraud* yaitu:

1. Adanya masalah keuangan serius yang tidak dapat dipecahkan oleh pelaku.
2. Adanya kesempatan.
3. Rasionalisasi.

Pada tahun 2004 David dan Dana kemudian memperkenalkan elemen baru yang dikembangkan dari teori *fraud triangle* yaitu faktor kemampuan. Mereka beranggapan bahwa kemampuan merupakan salah satu unsur yang penting ketika seseorang melakukan tindakan *fraud*.

2.4.4 Pencegahan *Fraud*

Mencegah kecurangan merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menangkal para pelaku yang dianggap potensial, mempersempit ruang gerak dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya kecurangan (Karbvono, 2013:47). Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kecurangan yang mungkin terjadi dapat dicegah dengan beberapa cara diantaranya:

1. Membangun struktur pengendalian internal yang baik

Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya suatu perusahaan, maka tugas semakin berat. Hal tersebut terjadi agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian internal yang baik dan efektif mencegah kecurangan. Dalam memperkuat pengendalian intern di perusahaan, COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*) pada bulan September 1992 memperkenalkan suatu kerangka pengendalian yang lebih luas daripada model pengendalian akuntansi yang tradisional dan mencakup manajemen risiko, yaitu pengendalian intern yang terdiri dari 5 komponen yang saling terkait diantaranya:

- a. Lingkungan pengendalian (*control environment*), menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.
- b. Penaksiran risiko (*risk assessment*) adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
- c. Standar pengendalian (*control activities*) adalah kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
- d. Informasi dan komunikasi (*information and communication*) adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu

bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.

- e. Pemantauan (*monitoring*) adalah proses menentukan mutu kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.
2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian
 - a. Reviu kinerja adalah aktivitas pengendalian yang mencakup reviu atas kinerja yang sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan, dan reviu atas kinerja fungsional atau aktivitas seseorang manajer kredit atas laporan cabang perusahaan tentang persetujuan dan penagihan pinjaman.
 - b. Pengelolaan informasi dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian dari sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk *mainframe*, *mini computer* dan lingkungan pemakai akhir

(*end user*). Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya dan diolah secara lengkap dan akurat.

- c. Pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan, otorisasi untuk akses ke program computer dan data files serta perhitungan secara periodic dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.
- d. Pemisah tugas mencakup pembebanan tanggungjawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditunjukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

3. Meningkatkan kultur organisasi

Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham ataupun masyarakat secara keseluruhan.

4. Mengefektifkan fungsi internal audit

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen agar fungsi internal audit bisa efektif membantu manajemen dalam melaksanakan

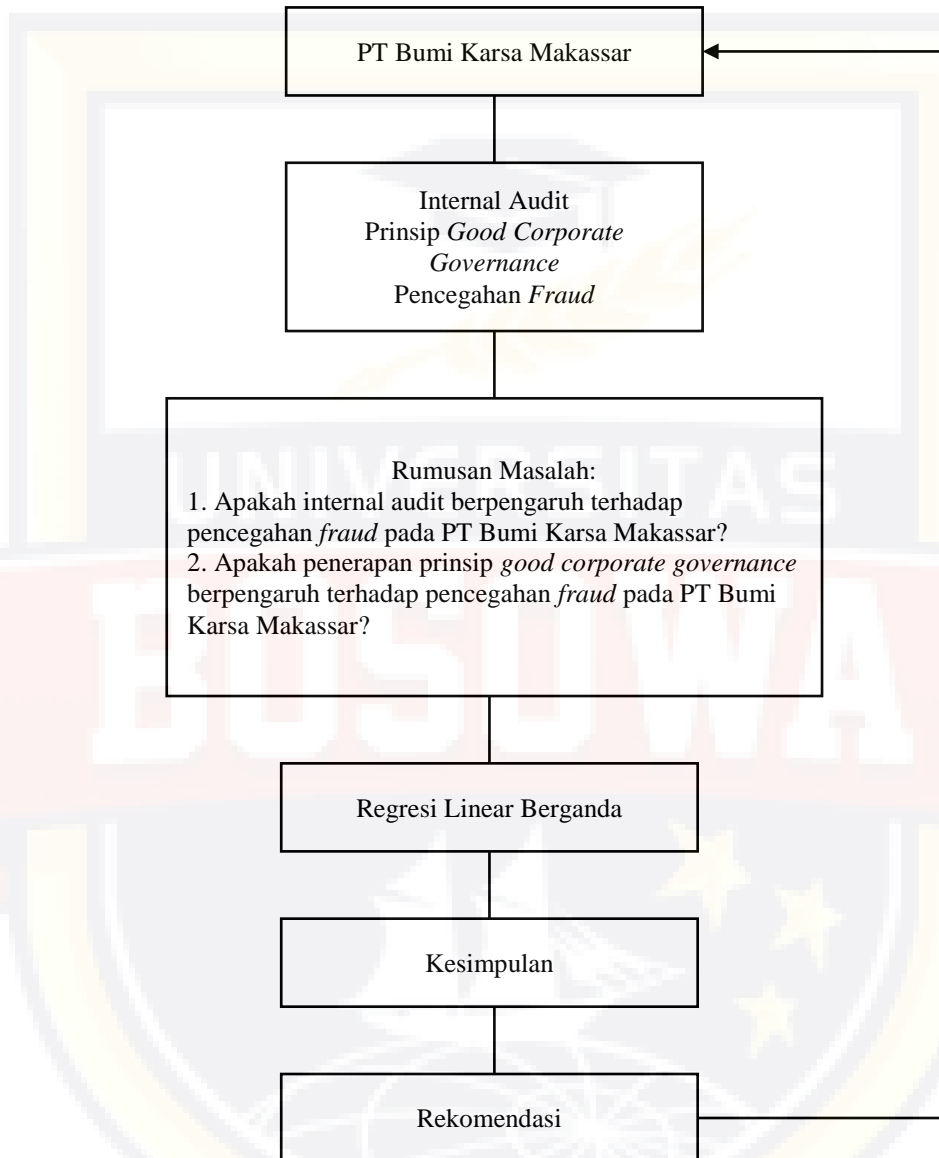
tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksa adalah sebagai berikut:

- a. Bagian internal audit haruslah memiliki kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan dalam artian seorang auditor internal tidak boleh terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan dan bertanggung jawab kepada atau melaporkan kegiatannya ke top manajemen.
- b. Bagian audit internal harus mempunyai uraian tugas secara tertulis, sehingga setiap auditor mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggungjawabnya. Internal audit harus mempunyai internal audit annual yang berguna dalam:
 1. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
 2. Menentukan standar yang berguna untuk mengukur dan meningkatkan kinerja manajemen.
 3. Memberikan keyakinan bahwa hasil akhir internal audit departemen sesuai dengan persyaratan dari internal audit direktur.
- c. Harus mendapat dukungan yang kuat dari para top manajemen kepada internal audit. Dukungan yang dimaksud dapat berupa:
 1. Penempatan internal audit departemen dalam posisi yang independen.
 2. Penempatan audit staf dengan gaji yang cukup menarik.
 3. Penyediaan waktu yang cukup dari top manajemen untuk membaca, mendengarkan dan mempelajari laporan-laporan

internal audit departemen dan respon cepat dan tegas terhadap saran-saran perbaikan yang diajukan oleh internal auditor.

- d. Bagian internal audit harus memiliki sumber daya yang profesional, bisa bersikap objektif dan mempunyai integritas dan loyalitas yang tinggi.
- e. Internal auditor harus dapat bekerja sama dengan akuntan publik.
- f. Menciptakan struktur penggajian yang wajar dan pantas.
- g. Mengadakan rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti
- h. Memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi.
- i. Menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian-pemberian dari luar harus diinformasikan dan dijelaskan pada orang-orang yang dianggap perlu agar jelas mana yang hadiah dan mana yang berupa sogokan dan yang resmi.
- j. Menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi kecurangan karena kecurangan sulit untuk ditemukan dalam pemeriksaan yang biasa-biasa saja.
- k. Menyediakan saluran-saluran untuk melaporkan telah terjadinya kecurangan yang hendaknya diketahui oleh para staf agar dapat diproses pada jalur yang benar.

2.5 Kerangka Pikir

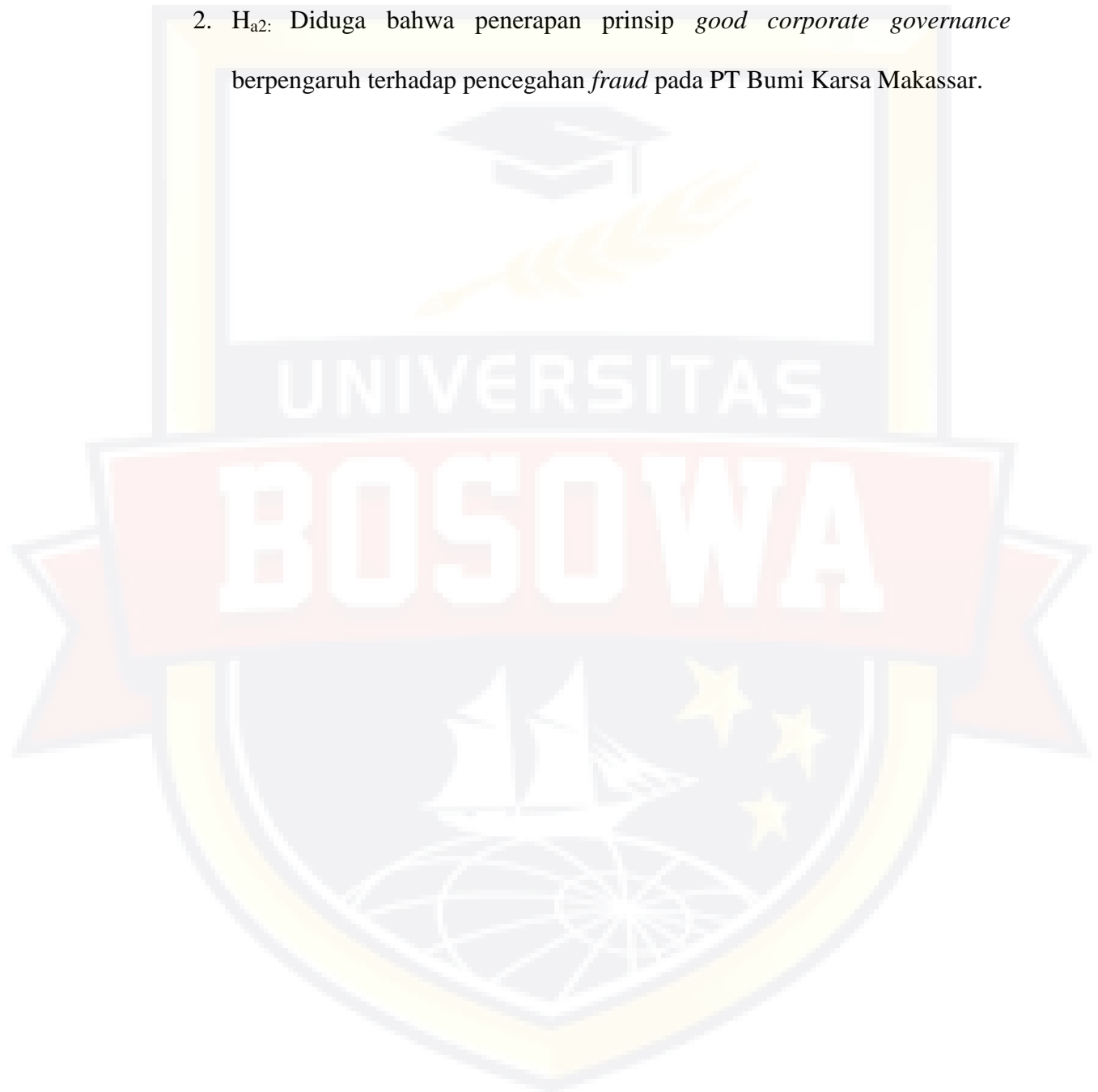


Gambar 2.1 Kerangka pikir

2.6 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dibuat, peneliti kemudian merumuskan hipotesis yang akan dibuktikan melalui kegiatan penelitian ini yaitu:

1. H_{a1} : Diduga bahwa internal audit berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bumi Karsa Makassar.
2. H_{a2} : Diduga bahwa penerapan prinsip *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bumi Karsa Makassar.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Daerah dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Bumi Karsa Makassar yang terletak di Jl. Dr Sam Ratulangi No.8, Gedung Wisma Kalla Lantai 11. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dimulai pada bulan juli 2020 hingga bulan September 2020.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Studi lapangan

Studi lapangan adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian yang ingin diteliti dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada karyawan PT Bumi Karsa Makassar.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mendalami, dan mempelajari *literature* yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berwujud angka atau bilangan. Data kuantitatif biasanya dijadikan sebagai bahan dasar bagi setiap permasalahan yang bersifat statistik. Data kuantitatif pada umumnya diolah dengan menggunakan teknik perhitungan matematika. Dalam penelitian ini data kuantitatif berupa hasil dari kuesioner yang dibagikan kepada karyawan PT Bumi Karsa Makassar.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pihak pengumpul data. Data primer tersebut diperoleh oleh penulis dari hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh karyawan PT Bumi Karsa Makassar.

3.4 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:49). Sedangkan menurut Deni Darmawan (2013:137) populasi adalah sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki jumlah yang banyak dan luas. Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dapat dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Bumi Karsa Makassar.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi (Sugiyono, 2017:16). Sampel pada prinsipnya adalah sebuah langkah untuk menentukan banyaknya responden yang diperlukan untuk melakukan suatu penelitian. Sampel yang dipilih haruslah representative, dalam artian karakteristik dari suatu populasi haruslah tercermin pada sampel yang telah dipilih.

Menurut Sugiyon (2017:122), ukuran populasi yang kurang dari 100 maka pengambilan sampelnya sekurang-kurangnya adalah 50% dari besarnya populasi. Sedangkan apabila ukuran populasi sama dengan atau lebih dari 100, maka ukuran sampelnya sekurang-kurangnya 15% dari besarnya populasi tersebut.

Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 80 orang, maka peneliti memilih sampel sebanyak 30 orang untuk dijadikan responden.

3.5 Teknik Sampling

Sampling adalah cara pengumpulan data yang sifatnya tidak menyeluruh. Maksud dari tidak menyeluruh disini adalah tidak mencakup seluruh objek penelitian, tetapi hanya sebagian dari jumlah populasi yang ada. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik *probability sampling* dengan metode pengambilan sampel secara *simple random sampling*. Teknik *probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2017:116).

Pada penelitian ini pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan *simple random sampling*. *Simple random sampling* adalah suatu teknik penentuan sampel tanpa memperhatikan strata tertentu yang ada dalam suatu populasi (Sugiyono, 2017:122).

3.6 Metode Analisis

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistic deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Statistic deskriptif membeikan gambaran atau deskripsi mengenai data yang ditinjau dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum serta minimum (Ghozali, 2013:19).

3.6.2 Uji Kualitas Data

1. Uji validitas

Uji validitas adalah suatu uji tentang tingkat kemampuan instrument untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi susunan pokok pengukuran dengan instrumen tersebut. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian dan dapat mengungkap data dan variabel yang diteliti secara tepat (Sugiyono, 2018:137). Pada penelitian ini, uji validitas menggunakan alat uji yang disebut dengan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS) for windows*.

2. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan terhadap pernyataan yang dinyatakan valid. Reliabilitas dikatakan baik apabila nilai *cronbach's alpha* > nilai *cronbach's*

alpha standard yaitu 0,6. Reliabilitas ini menunjukkan sejauh mana tingkat konsistensi pengukuran dari satu responden ke responden lain atau menunjukkan sejauh mana pernyataan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi dalam pemahaman mengenai suatu pernyataan.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Normalitas data dinilai sangat penting karena dengan adanya data yang terdistribusi normal maka data tersebut kemudian dianggap dapat mewakili suatu populasi (Priyanto, 2014:69).

2. Uji multikolinearitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah model regresi mempunyai korelasi antara variabel bebas. Regresi dinilai baik apabila tidak terdapat korelasi antara variabel independen. Apabila koefisien korelasi variabel yang bersangkutan nilainya terletak di luar batas-batas penerimaan (*critical value*) maka koefisien bermakna dan terjadi multikolinieritas. Apabila koefisien korelasi terletak di dalam batas-batas penerimaan maka koefisien korelasinya tidak bermakna dan tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji heterokedasitas

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya yang tetap atau disebut dengan homokedasitas. Adapun pengujian ini

dapat dilakuka dengan metode *scatter plot*. Apabila pengujian ini dilakukan dan terdapat pola tertentu yaitu membentuk seperti titik-titik atau poin-poin yang teratur atau membentuk pola misalnya bergelombang, melebar dan menyempit, maka hal tersebut dapat menjadi pertanda telah terjadinya heterokedasitas.

3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan mengenai bagaimana keadaan naik dan turunnya variabel independen, bila dua atau lebih. variabel independen merupakan faktor *predictor* dinaikkan atau diturunkan nilainya (dimanipulasi). Analisis regresi berganda haruslah dilakukan apabila jumlah variabel independennya minimal dua variabel. Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel bebas yaitu *internal audit* dan penerapan prinsip *good corporate governance*. Adapun persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan:

Y = pencegahan fraud

b_0 = konstanta regresi

b_1, b_2 = koefisien determinasi

X_1 = internal audit

X_2 = penerapan prinsip GCG

e = *error*

3.6.5 Analisis Koefisien Determinasi

Menurut Imam Ghozali (2013:177), uji determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan dari variabel bebas menjelaskan variabel

terikat yang ditinjau melalui *adjusted R*². Koefisien determinasi digunakan apabila variabel bebas dalam penelitian yang dilakukan lebih dari dua variabel bebas. Jika hasil yang diperoleh $>0,5$ maka model yang digunakan dianggap cukup baik dalam membuat estimasi. Semakin besar angka koefisien determinasi maka semakin baik model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Sebaliknya, apabila koefisien determinasi semakin kecil maka semakin lemah model tersebut untuk menjelaskan variabilitas dari variabel terikatnya.

3.6.6 Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen. Menurut Sugiyono (2008:170) untuk menguji signifikansi hubungan, yaitu apakah hubungan yang ditemukan berlaku untuk seluruh populasi, maka perlu diuji signifikansinya. Adapun kriteria penerimaan hipotesis menggunakan uji t adalah sebagai berikut:

- a. H_0 ditolak, H_a diterima (Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$)
- b. H_0 diterima, H_a ditolak (Apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$)

Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi yaitu 0,05. Jika nilai signifikansi $<$ taraf signifikansi 0,05 maka hipotesis yang diajukan akan diterima. Sedangkan apabila sebaliknya maka hipotesis yang diajukan akan ditolak.

2. Uji F

Menurut Sugiyono (2018:67) uji F digunakan dalam pengujian signifikan terhadap korelasi ganda, dimana dua atau lebih variabel independen berhubungan secara simultan (bersamaan) terhadap variabel dependen. Adapun kriteria untuk menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak, H_a diterima.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima, H_a ditolak.

3.7 Definisi Operasional

3.7.1 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

1. Internal audit (X_1)

Internal audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit dalam perusahaan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal adalah pemeriksaan terhadap laporan keuangan serta catatan akuntansi dari perusahaan itu sendiri. Selain hal tersebut, fungsi lain dari auditor internal adalah mengawasi ketaatan perusahaan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan, serta ketaatan perusahaan terhadap peraturan pemerintah maupun ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Variabel X_1 ini kemudian diukur dengan menggunakan indikator unsur-unsur internal audit yaitu independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

2. Penerapan prinsip *good corporate governance* (X_2)

Penerapan dari prinsip GCG sendiri diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya hubungan istimewa yang kemudian akan menimbulkan kerugian pemegang saham minoritas. Tujuan penerapan GCG lainnya yaitu mampu untuk mencegah terjadinya akuisisi internal serta perdagangan orang dalam. Penerapan prinsip GCG pada perusahaan pada saat ini menjadi salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi bagi para investor. Variabel X_2 ini kemudian diukur dengan menggunakan indikator prinsip GCG yaitu akuntabilitas, pertanggung jawaban, keterbukaan, kewajaran serta kemandirian.

3.7.2 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai variabel terikat atau *dependent variable* adalah pencegahan *fraud* sebagai variabel Y. *Fraud* adalah tindakan kecurangan yang dilakukan individu atau kelompok dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. *Fraud* terjadi karena adanya keadaan atau kondisi yang memberikan peluang maupun kesempatan sehingga mendorong individu atau kelompok untuk melakukan tindakan curang. Variabel Y ini kemudian diukur dengan menggunakan indikator pencegahan *fraud* menurut Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) yaitu membangun struktur pengendalian internal yang baik, mengefektifkan aktivitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi dan mengefektifkan fungsi internal audit.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT Haji Kalla adalah perusahaan milik keluarga yang didirikan pada tahun 1952. Berawal dari perusahaan perdagangan dan transportasi yang dulunya dipimpin oleh Bapak Haji Kalla yang menjabat sebagai Direktur. Pada tahun 1967 Haji Kalla kemudian menyerahkan perusahaannya kepada putranya yang bernama Jusuf Kalla. Dibawah kepemimpinan Jusuf Kalla, PT Haji Kalla berhasil melebarkan bisnisnya ke bidang konstruksi. Pelebaran bisnis yang dilakukan Jusuf Kalla dimulai ketika pada 14 Februari 1969 didirikanlah perusahaan yang diberi nama PT Bumi Karya.

PT Bumi Karya didirikan untuk menjawab kebutuhan konstruksi yang semakin meningkat. Empat tahun kemudian, nama PT Bumi Karya berubah menjadi PT Bumi Karsa. PT Bumi Karsa merupakan anak perusahaan pertama dari PT Haji Kalla. Pada tahun 2010 PT Haji Kalla mengalami transformasi menjadi Kalla Group. Adapun bisnis ini dari Kalla Grup adalah otomotif, konstruksi, keuangan, property, transportasi dan logistik, energi serta pendidikan. PT Bumi Karsa sendiri merupakan bagian dari unit usaha konstruksi Kalla Grup bersama dengan PT Sarana Beton dan PT Bukaka Teknik Utama.

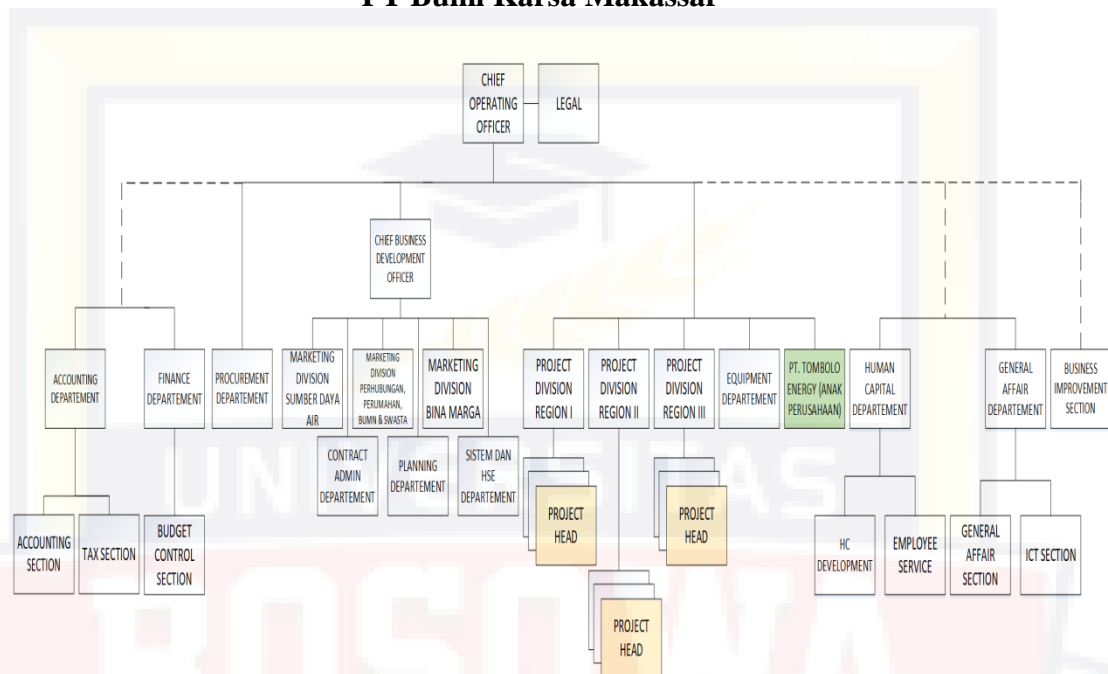
4.1.2 Profil Perusahaan

PT Bumi Karsa didirikan di Ujung Pandang pada tanggal 14 Februari 1969. Bumi Karsa didirikan oleh Bapak Muhammad Jusuf Kalla. PT Bumi Karsa merupakan perusahaan jasa konstruksi yang pada awal didirikan bernama PT Bumi Karya. Setelah empat tahun berjalan, PT Bumi Karya kemudian berganti nama menjadi PT Bumi Karsa pada tahun 1973. Pada awalnya, perusahaan ini hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur di daerah Sulawesi Selatan, namun seiring berjalannya waktu, PT Bumi Karsa terus berkembang, kemudian menjadi perusahaan berskala nasional yang dipercayai untuk mengerjakan proyek-proyek konstruksi di berbagai wilayah tanah air, mulai dari pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

Selain fokus pada bidang jasa konstruksi, PT Bumi Karsa juga telah melakukan pengembangan bisnis dengan mendirikan beberapa anak perusahaan. Di sektor energy, telah didirikan PT Tombolo Energy yang mengelola PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro) Tombolo Pao di Kabupaten Gowa yang bertujuan untuk memajukan infrastruktur, khususnya di Sulawesi Selatan. Selain itu, ada perusahaan lain yang merupakan anak perusahaan PT Bumi Karsa yaitu PT Bumi Infrastruktur Maritim yang diharapkan mampu berkontribusi banyak pada sektor kemaritiman. Anak perusahaan lain dari perusahaan ini yaitu PT Bumi Beton sebagai pracetak yang diharapkan dapat menunjang dan memaksimalkan kinerja PT Bumi Karsa sendiri.

4.1.2 Struktur Organisasi

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi
PT Bumi Karsa Makassar**



Sumber: PT Bumi Karsa Makassar, 2020

Adapun tugas dan tanggung jawab dari tiap-tiap departemen dalam perusahaan PT Bumi Karsa Makassar adalah sebagai berikut:

1. *Chief Operating Officer (COO)*

COO bertanggung jawab dalam mengawasi bisnis perusahaan dan melaporkan kepada CEO. COO memiliki tugas untuk memastikan perusahaan memiliki prosedur operasional dan keuangan yang efektif.

2. *Accounting Departemen*

Bagian akuntansi dalam perusahaan bertugas untuk memastikan pengelolaan laporan keuangan perusahaan secara wajar dan tepat waktu, melalui pengelolaan proses pencatatan akuntansi keuangan dan aset perusahaan secara

tertib dan cermat serta sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Adapun tugas dan tanggung jawab departemen akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan seluruh transaksi keuangan perusahaan dikelola sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Memastikan pengelolaan kas dan aset perusahaan dilaksanakan dengan tertib dan akurat.
- c. Memastikan penyusunan laporan keuangan dilaksanakan dengan tertib sesuai jadwal dan kaidah yang telah ditentukan.
- d. Memastikan konsep, kebijakan dan sistem pengelolaan akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan dan menunjang kepentingan bisnis perusahaan dan diimplementasikan secara efektif.
- e. Memastikan seluruh kegiatan dibawah koordinasinya berjalan efektif dan efisien sesuai dengan prosedur yang berlaku dibidang *accounting*.
- f. Memastikan pengembangan kemampuan bawahan agar tercapai target kinerja yang ditetapkan.

3. *Finance Departement*

Bagian departemen keuangan memiliki tugas untuk memastikan tersedianya perencanaan dan strategi operasional pada bidang keuangan, sehingga dapat mengoptimalkan profit dari kegiatan bisnis perusahaan. Departemen keuangan juga diharap mampu untuk memastikan keseimbangan kondisi keuangan perusahaan dengan mengelola secara tepat untuk arus kas, modal dan

piutang perusahaan. Adapun tugas dan tanggung jawab departemen keuangan antara lain:

- a. Memastikan strategi operasional *finance* yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan serta menunjang kepentingan bisnis perusahaan.
- b. Memastikan kegiatan pengelolaan keuangan perusahaan berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
- c. Memastikan tersedianya analisa keuangan perusahaan yang tepat dan efektif sebagai dasar pengambilan keputusan bagi manajemen.
- d. Memastikan penyusunan laporan keuangan dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan jadwal dan kaidah yang telah ditentukan.
- e. Memastikan pengembangan kemampuan bawahan agar tercapai target kinerja yang ditetapkan.

4. *Procurement Departement*

Departemen ini memiliki tugas untuk memastikan analisa efisiensi pengadaan kebutuhan *procurement* dalam pekerjaan konstruksi secara tepat waktu, jumlah dan mutu dengan tetap menjaga arus kas perusahaan, guna mendukung kelancaran penyelesaian pekerjaan. Selain itu departemen ini juga memastikan ketersediaan dan keakuratan database vendor, supplier, sub-kontraktor dan relasi perusahaan yang kompetitif dan memiliki reputasi sangat baik. Adapun tanggung jawab departemen *procurement* adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan ketersediaan analisa yang komprehensif mengenai efisiensi pelaksanaan pekerjaan konstruksi oleh perusahaan.

- b. Memastikan perencanaan *procurement* yang komprehensif guna mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- c. Memastikan kebutuhan *procurement* dipenuhi secara tepat waktu, jumlah serta kualitas.
- d. Memastikan persediaan material di gudang dan dilokasi dikelola sesuai dengan prosedur pengelolaan barang.
- e. Memastikan konsep, kebijakan dan sistem di bidang *procurement* yang dapat memenuhi kebutuhan dan menunjang kepentingan bisnis perusahaan dan diimplementasikan secara efektif.

5. *Marketing Departement*

Departemen marketing memastikan dimanfaatkannya peluang pasar secara optimal melalui perolehan kontrak pekerjaan secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan kemampuan dan strategi perusahaan. Departemen pemasaran juga bertugas untuk memastikan diberikannya dukungan yang optimal kepada kegiatan operasi dalam memenuhi komitmen pekerjaan yang telah dijanjikan. Adapun tugas dari departemen pemasaran antara lain:

- a. Memastikan peluang pasar diidentifikasi dengan baik sebagai bahan pengambilan keputusan
- b. Memastikan peluang pekerjaan konstruksi dapat direalisasikan dalam kontrak pekerjaan.
- c. Memastikan penerapan strategi harga dilaksanakan dengan tepat untuk mendukung keberhasilan pemasaran.

6. *Contract Admin Departement*

Departemen ini bertugas untuk membantu *managing director* dengan cara menyajikan sistem *data base* yang *up to date* agar darinya dapat tersusun dokumen penawaran tender dengan APP yang akurat dan jelas sehingga diperoleh kontrak kerja yang menguntungkan perusahaan. Adapun tugas dan tanggung jawab departemen ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjami kelengkapan dokumen tender pra-kualifikasi perusahaan.
- b. Menjamin kelengkapan dokumen tender pasca kualifikasi perusahaan.
- c. Memastikan evaluasi APP yang diajukan oleh Kepala Proyek dan evaluasi kinerja masing-masing proyek, bersama Kepada Divisi terkait.

7. *Planning Departement*

Membantu *chief business development* dalam mempersiapkan data-data perencanaan penawaran jasa konstruksi untuk keperluan tender perusahaan dengan cara menyajikan sistem *data base* yang *up to date* agar darinya dapat tersusun dokumen penawaran tender dengan APP yang akurat dan jelas sehingga diperoleh kontrak kerja yang menguntungkan bagi perusahaan.

- a. Memastikan syarat administrasi tender sesuai dengan persyaratan.
- b. Memastikan dokumen administrasi tender sesuai dengan persyaratan.
- c. Bersama unit terkait, menyusun dan menjamin RAPP dan dokumen penawaran dalam mengikuti proses tender serta mengikuti proses pemasukan dan pembukuan penawaran.

8. QMS dan HSE Departemen

- a. Menjalankan organisasi QHSE/SMK3L perusahaan yang efektif dan didukung oleh sumberdaya yang diperlukan.
- b. Memastikan pengendalian dokumen penerapan Sistem Manajemen QHSE di perusahaan.
- c. Memastikan sistem dan prosedur pengendalian masalah lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan peralatan, yang diimplementasikan secara efektif oleh seluruh pekerja yang berada di lingkungan peralatan.

9. *Project Departement*

Departemen ini bertugas untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab perusahaan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan komitmen biaya, waktu, dan mutu yang telah diperjanjikan dengan pemilik proyek. Selain itu departemen ini juga bertanggung jawab untuk memastikan diperolehnya nilai tambah dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk meningkatkan laba perusahaan.

10. *Equipment Departement*

- a. Memastikan pengelolaan alat berat dilaksanakan secara efektif untuk mendukung kelancaran pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh perusahaan.
- b. Memastikan pengelolaan *plant* dilaksanakan secara efektif untuk mendukung kelancaran pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh perusahaan.

- c. Memastikan berkembangnya pasar penyewaan alat berat dan *plant* di luar lingkungan unit kerja perusahaan.
- d. Memastikan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan berlangsung efektif dan efisien.

11. *General Affairs* dan *HSE Departemen*

Departemen ini bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa yang mendukung seluruh aktivitas operasional kantor dan melakukan pemeliharaan aset fisik kantor Devcon serta bekerja sama dengan Departemen BisDev, Procurement, HC dan Keuangan untuk melakukan pengelolaan anggaran atas biaya pengadaan barang/jasa, pemeliharaan serta biaya-biaya lain yang terkait dan pengelolaan serta penerapan sistem HSE di lingkungan Sub Holding dan SBU Devcon.

4.1.3 Visi dan Misi Perusahaan

Adapun visi dari PT Bumi Karsa yaitu menjadi perusahaan infrastruktur berskala internasional yang berdaya saing dan inovatif. Dalam mewujudkan visi perusahaan haruslah memiliki misi yang jelas dan terarah. Misi dari PT Bumi Karsa sendiri adalah membumi dan berkarya bersama mitra dan pelanggan.

4.2 Hasil Penelitian dan Analisis

4.2.1 Profil Responden

Penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner ke responden yang merupakan karyawan yang bekerja pada PT Bumi Karsa Makassar. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kemudian diketahui bahwa terdapat karakteristik responden yang cukup bervariasi, baik itu dari jenis kelamin, usia, pendidikan dan lama bekerja di PT

Bumi Karsa Makassar. Adapun karakteristik dari responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	16	54%
2	Perempuan	14	46%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data Kuesioner yang telah diolah

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa responden yang merupakan karyawan pada PT Bumi Karsa Makassar yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 16 orang atau 54% dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 14 orang atau 46% dari total responden sebanyak 30 orang.

Adapun karakteristik lain dari responden dalam penelitian ini yang ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	D3	8	27%
2	S1	21	70%
3	S3	1	3%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah

Pada tabel tersebut dapat diketahui informasi bahwa responden dalam penelitian ini ditinjau dari karakteristik tingkat pendidikan, karyawan dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 8 orang atau 27%, yang memiliki tingkat

pendidikan S1 sebanyak 21 orang atau 70% dan dengan tingkat pendidikan S3 sebanyak 1 orang atau 3%.

Karakteristik responden selanjutnya ditinjau dari lamanya karyawan tersebut bekerja pada perusahaan PT Bumi Karsa Makassar. Adapun karakteristik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	< 1 Tahun	2	7%
2	1-3 Tahun	7	23%
3	>3 Tahun	21	70%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah

Pada tabel yang telah disajikan diatas, terlihat bahwa responden yang bekerja kurang dari satu tahun pada PT Bumi Karsa Makassar sebanyak 2 orang atau 7%. Sedangkan karyawan yang telah bekerja selama satu sampai tiga tahun sebanyak 7 orang atau 23% dan yang telah bekerja lebih dari 3 tahun pada PT Bumi Karsa Makassar adalah sebanyak 21 orang atau 70%.

4.2.2 Hasil Penelitian

1. Hasil uji statistic deskriptif

Pada penelitian ini akan menggambarkan nilai dari hasil pengujian statistic deskriptif antara internal audit dan penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud*. Adapun hasil pengujian deskriptif pada penelitian ini sebagaimana hasil data yang telah diolah dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil uji deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
PENCEGAHAN_FRAUD	25,93	2,132	30
INTERNAL_AUDIT	25,73	2,132	30
PRINSIP_GCG	37,03	2,883	30

Sumber: Data kuesioner yang diolah dengan SPSS 26

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah responden yang valid, yang dapat diproses adalah sebanyak 30 responden. Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel internal audit memiliki rata-rata total jawaban 25,73 dan standar deviasi sebesar 2,132. Pada variabel prinsip GCG memiliki rata-rata total jawaban 37,03 dan standar deviasi sebesar 2,882. Sedangkan untuk variabel pencegahan *fraud* 25,93 dengan standar deviasi 2,132.

B. Uji Kualitas Data

1. Hasil uji validitas

Uji validitas data merupakan suatu uji yang menilai kualitas suatu data untuk mengukur valid atau tidaknya sebuah pernyataan dalam kuesioner yang dibagikan. Uji validitas dilakukan dengan melihat jawaban yang didapatkan dari kuesioner yang telah dibagikan dalam penelitian ini. Adapun data dari kuesioner yang telah disebar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kuesioner yang disebar sebanyak 30 kuesioner
- b. Kuesioner yang dikembalikan sebanyak 30 kuesioner

- c. Kuesioner yang tak dikembalikan sebanyak 0
- d. Kuesioner yang diperhitungkan sebanyak 30 kuesioner

Pada pengujian validitas, pernyataan dalam kuesioner sebanyak 30 pernyataan yang terdiri atas 10 pernyataan untuk variabel X1 (Internal Audit) dan 11 pernyataan untuk variabel X2 (*Good Corporate Governance*). Pada penelitian ini uji validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 26. Hasil perhitungan uji validitas dimana ketentuan pernyataan yang dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ dimana r_{tabel} berdasarkan rumus $df = N-2$ dan diperoleh r_{tabel} sebesar 0,361 sebagai berikut

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Internal Audit

Nomor pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
IA_1	0,106	0,361	Tidak Valid
IA_2	0,566**	0,361	Valid
IA_3	0,618**	0,361	Valid
IA_4	0,595**	0,361	Valid
IA_5	0,450*	0,361	Valid
IA_6	0,288	0,361	Tidak Valid
IA_7	0,360	0,361	Tidak Valid
IA_8	0,064	0,361	Tidak Valid
IA_9	0,373*	0,361	Valid
IA_10	0,476**	0,361	Valid

Sumber: Data kuesioner yang diolah dengan Program SPSS 26

Pada tabel diatas terlihat bahwa pada variabel internal audit mempunyai kriteria tidak valid yang terdapat pada pernyataan nomor IA_1, IA_6, IA_7 dan IA_8, dimana pada keempat pernyataan nilai r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} . Sehingga ketiga pernyataan tersebut dihapuskan.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Internal Audit

Nomor pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
IA_2	0,646**	0,361	Valid
IA_3	0,629**	0,361	Valid
IA_4	0,804**	0,361	Valid
IA_5	0,518**	0,361	Valid
IA_9	0,493**	0,361	Valid
IA_10	0,508**	0,361	Valid

Sumber: Data kuesioner yang diolah dengan Program *SPPS 26*

Setelah ketiga pernyataan tersebut dihapuskan, semua pernyataan kuesioner dalam variabel internal audit (X1) dikatakan valid karena semua pernyataan memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar disbanding r_{tabel} .

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Penerapan *Good Corporate Governance*

Nomor pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
GCG_1	0,440*	0,361	Valid
GCG_2	0,453*	0,361	Valid
GCG_3	0,595**	0,361	Valid
GCG_4	0,676**	0,361	Valid
GCG_5	0,438*	0,361	Valid
GCG_6	0,445*	0,361	Valid
GCG_7	0,365*	0,361	Valid
GCG_8	0,407*	0,361	Valid
GCG_9	0,508**	0,361	Valid
GCG_10	0,623**	0,361	Valid
GCG_11	0,277	0,361	Tidak Valid

Sumber: Data kuesioner yang diolah dengan Program *SPPS 26*

Pada tabel diatas, pada variabel x2 mempunyai kriteria yang tidak valid pada pernyataan nomor GCG_11 dimana nilai r_{hitung} lebih kecil dari nilai r_{tabel} . Maka untuk menghasilkan data yang valid maka pernyataan GCG_11 dihapuskan.

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Penerapan *Good Corporate Governance*

Nomor pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
GCG_1	0,507**	0,361	Valid
GCG_2	0,532**	0,361	Valid
GCG_3	0,549**	0,361	Valid
GCG_4	0,667**	0,361	Valid
GCG_5	0,434*	0,361	Valid
GCG_6	0,459*	0,361	Valid
GCG_7	0,388*	0,361	Valid
GCG_8	0,441*	0,361	Valid
GCG_9	0,553**	0,361	Valid
GCG_10	0,577**	0,361	Valid

Sumber: Data kuesioner yang diolah dengan Program SPSS 26

Dari tabel yang disajikan diatas, dapat terlihat bahwa setelah pernyataan kuesioner GCG_11 dihapuskan maka menunjukkan semua pernyataan variabel X2 dinyatakan valid.

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Pencegahan *Fraud*

Nomor pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
PF_1	0,094	0,361	Tidak Valid
PF_2	0,459*	0,361	Valid
PF_3	0,452*	0,361	Valid
PF_4	0,597**	0,361	Valid
PF_5	0,224	0,361	Tidak Valid
PF_6	0,576**	0,361	Valid
PF_7	0,597**	0,361	Valid
PF_8	0,486**	0,361	Valid
PF_9	0,525**	0,361	Valid

Sumber: Data kuesioner yang diolah dengan Program SPSS 26

Dari tabel yang disajikan dapat diketahui bahwa pernyataan nomor PF_1 dan PF_5 dinyatakan tidak valid karena nilai r_{hitung} lebih kecil dibandingkan r_{tabel} . Sehingga kedua pernyataan tersebut dihapuskan.

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Pencegahan *Fraud*

Nomor pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
PF_2	0,486**	0,361	Valid
PF_3	0,622**	0,361	Valid
PF_4	0,608**	0,361	Valid
PF_6	0,493**	0,361	Valid
PF_7	0,635**	0,361	Valid
PF_8	0,541**	0,361	Valid
PF_9	0,498**	0,361	Valid

Sumber: Data kuesioner yang diolah dengan Program *SPPS 26*

Dari tabel yang telah disajikan, diketahui bahwa setelah dua pernyataan yang tidak valid dihapuskan, semua pernyataan mengenai pencegahan *fraud* dinyatakan valid karena nilai r_{hitung} lebih besar dibandingkan nilai r_{tabel} .

2. Hasil uji reliabilitas

Pengujian realibilitas bertujuan untuk menunjukkan konsistensi dari instrument penelitian. Pengujian realibilias menunjukkan hasil pengukuran relative konsisten apabila pengukuran terhadap aspek yang sama pada alat ukur yang sama. Dalam pengujian reabilitas nilai terendah menurut *Cronbach Alpha* adalah sebesar 0,6. Maka elemen tersebut dinyatakan reliabel, sedangkan apabila nilai *Cronback Alpha* kurang dari 0,6 maka elemen tersebut dinyatakan tidak reliabel. Adapun hasil pengujian reabilitas untuk variabel X1, variabel X2 dan Y adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil uji reliabilitas data

No	Variabel	<i>Cronbach's alfa</i>	Keterangan
1.	Internal Audit	0,645	Reliabel
2.	Prinsip GCG	0,682	Reliabel
3	Pencegahan <i>Fraud</i>	0,619	Reliabel

Sumber: Data kuesioner yang diolah dengan Program *SPPS 26*

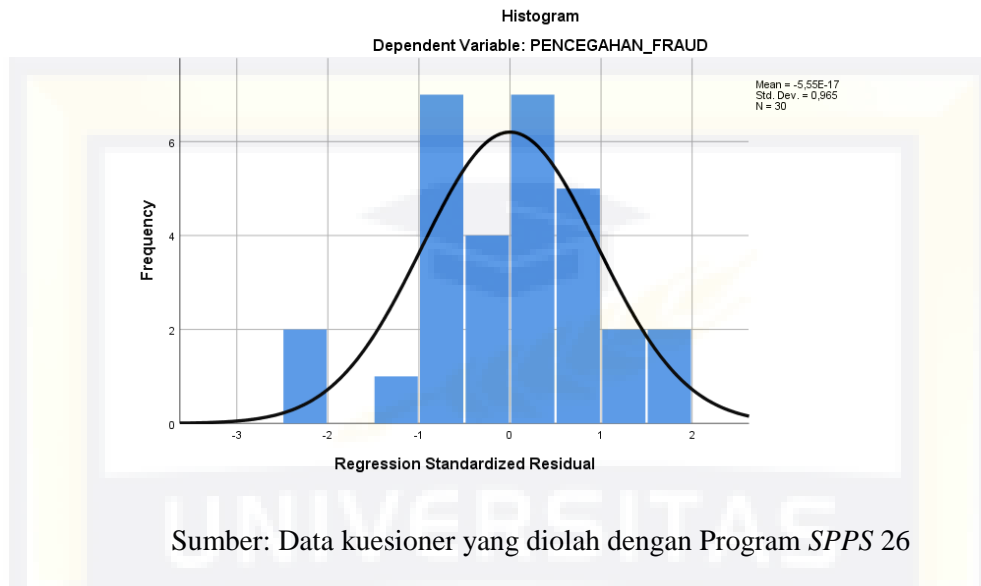
Dari tabel yang disajikan, diketahui bahwa hasil pengujian tiap variabel menunjukkan angka yang lebih besar dari nilai *Standardized Alpha* standar yaitu 0,6. Pada variabel internal audit memiliki *cronbach'alpha* sebesar 0,645 kemudian variabel prinsip GCG 0,682 dan variabel pencegahan *fraud* 0,619. Hasil pengujian tersebut kemudian menunjukkan bahwa instrument-instrumen penelitian dikatakan reliabel karena memiliki angka diatas 0,6.

B. Uji Asumsi Klasik

1. Hasil uji normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual terdistribusi dengan normal atau tidak. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model penelitian, variabel independen dan dependen atau kedua variabel tersebut berdistribusi secara normal. Adapun hasil pengujian normalitas dengan menggunakan grafik histogram dan grafik P-Plot adalah sebagai berikut:

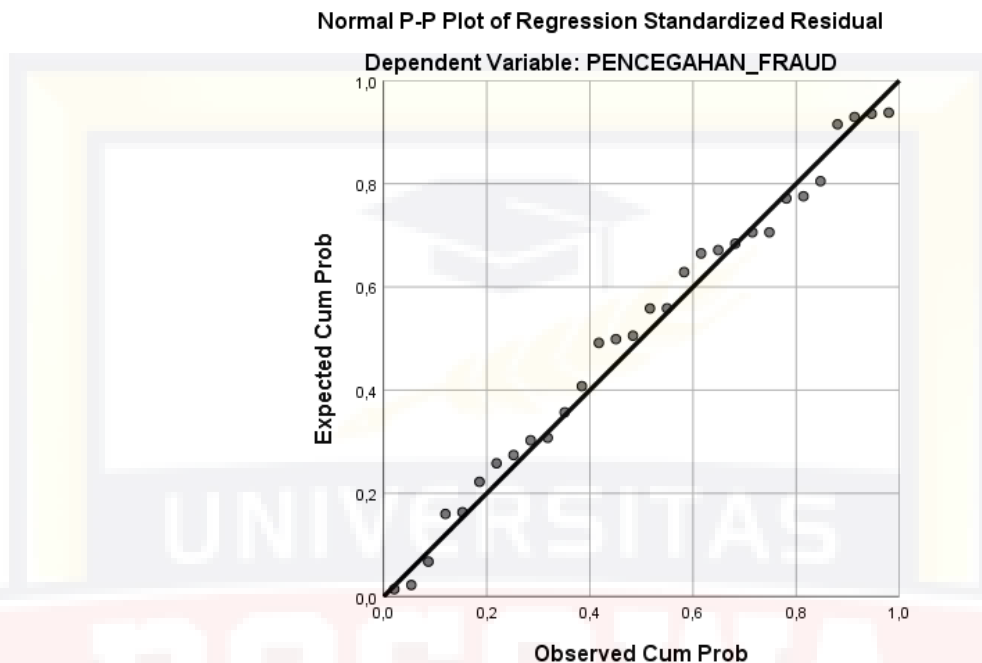
Gambar 4.2
Hasil Pengujian Normalitas Dengan Grafik Histogram



Dari hasil yang ditampilkan pada gambar 4.1 terlihat bahwa grafik memiliki bentuk seperti lonceng dan semua komponen grafik batang berada dalam garis kurva. Sehingga pengujian normalitas dengan histogram dapat dikatakan terdistribusi dengan normal.

Pada uji normalitas lain yang dilakukan dengan grafik P-Plot pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa penyebaran data yang terdapat pada sepanjang garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal tersebut, hal ini kemudian menunjukkan bahwa nilai residual data terdistribusi dengan normal

Gambar 4.3
Hasil Uji Normalitas Dengan Grafik P-Plot



Sumber: Data kuesioner yang diolah dengan Program *SPPS 26*

2. Uji multikolinearitas

Pada pengujian multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki korelasi antara variabel bebas. Apabila koefisien korelasi variabel yang bersangkutan nilainya terletak di luar batas-batas penerimaan (*critical value*) maka koefisien bermakna dan terjadi multikolinearitas. Sedangkan apabila sebaliknya maka tidak terjadi multikolinearitas. Adapun hasil pengujian multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
Internal audit	0,755	1,325
Prinsip GCG	0,755	1,325

Sumber: Data kuesioner yang diolah dengan Program *SPPS 26*

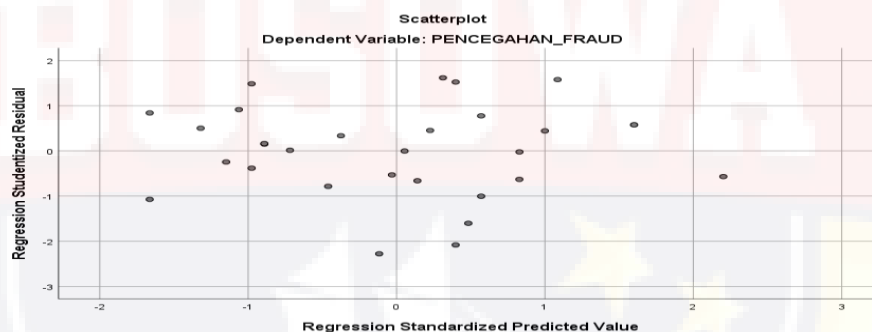
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk kedua variabel memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam uji heteroskedasitas pada penelitian ini menggunakan grafik *scatterplot*. Adapun hasil uji heteroskedasitas penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 4.4

Hasil Uji Heteroskedasitas dengan *scatterplot*



Sumber: Data kuesioner yang diolah dengan Program *SPPS 26*

Pada gambar 4.4 menunjukkan bahwa titik-titik dalam grafik menyebar dan menjauhi baik sumbu x maupun sumbu y. Dalam hasil grafi *scatterplot* pada penelitian ini, terlihat bahwa titik-titik data menyebar diatas serta dibawah angka 0, kemudian terlihat bahwa titik-titik tersebut tidak mengalami penumpukan pada satu tempat saja yaitu diatas dan dibawah saja, serta penyebaran data tidak membentuk pola bergelombang yang melebar, menyempit lalu melebar kembali

yang terjadi adalah penyebaran titik-titik data tidak membentuk suatu pola. Berdasarkan ciri tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi dalam penelitian ini.

C. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk dapat mengetahui pengaruh variabel independen yang digunakan pada penelitian ini terhadap variabel dependennya. Pada penelitian ini ingin diketahui bagaimana internal audit dan penerapan prinsip *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Pada penelitian ini jenis regresi yang digunakan adalah regresi linear berganda dimana terdapat dua variabel independen. Pada pengujian ini pengelolaan data oleh peneliti menggunakan SPSS versi 26. Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda.

Tabel 4.13
Hasil pengujian regresi berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
(Constant)	12,495	4,634		2,696	,012
INTERNAL_AUDIT	,687	,173	,687	3,971	,000
PRINSIP_GCG	-,114	,128	-,155	-,894	,379

Sumber: Data kuesioner yang diolah dengan Program SPSS 26

Berdasarkan hasil perhitungan yang dicantumkan pada tabel diatas, maka nilai koefisien apabila dimasukkan kedalam persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 12,495 + 0,687X_1 - 0,114X_2 + 0$$

Keterangan:

Y = Pencegahan *fraud*

b_1b_2 = Koefisien regresi

X_1 = Internal audit

X_2 = Perapan GCG

E = *Error* (0)

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda maka dapat dijelaskan bahwa:

- a. Jika variabel X_1 atau internal audit dan variabel X_2 atau penerapan prinsip GCG memiliki nilai sama dengan 0 maka pencegahan *fraud* memiliki nilai sebesar konstanta yaitu 12,495.
- b. Nilai koefisien regresi variabel internal audit sebesar 0,687 yang artinya internal audit mengalami kenaikan 1 satuan sehingga pencegahan *fraud* akan mengalami kenaikan sebesar 0,687 satuan. Koefisien pada internal audit memiliki nilai yang positif sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi hubungan yang positif pula antara internal audit (X_1) terhadap pencegahan *fraud* (Y) sehingga menyebabkan kenaikan internal audit yang akan mempengaruhi kenaikan pada pencegahan *fraud* juga.
- c. Nilai koefisien regresi variabel penerapan prinsip GCG sebesar -0,114 yang artinya apabila penerapan prinsip GCG mengalami kenaikan 1 satuan maka akan menyebabkan penurunan pada pencegahan *fraud* sebesar 0,114 satuan. Koefisien pada penerapan prinsip GCG memiliki nilai negatif sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi hubungan yang negatif antara penerapan prinsip GCG (X_2) terhadap pencegahan *fraud* (Y) sehingga apabila penerapan prinsip GCG semakin naik maka tidak akan mempengaruhi kenaikan pada pencegahan *fraud*.

D. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan presentase variabel independen yang digunakan dalam menjalankan variasi variabel dependen. Dalam melihat derajat ketergantungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dapat digunakan rumus koefisien determinasi.

Tabel 4.14
Pedoman interpretasi koefisien determinasi

Interval	Tingkat pengaruh
0%-19,9%	Sangat Rendah
20%-39,9%	Rendah
40%-59,9%	Sedang
60%-79,9%	Kuat
80%-100%	Sangat Kuat

Sumber: *Sugiyono* (2018:231)

Adapun nilai dari determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.15
Hasil koefisien determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,625 ^a	,390	,345	1,725	1,911

a. Predictors: (Constant), PRINSIP_GCG, INTERNAL_AUDIT

b. Dependent Variable: PENCEGAHAN_FRAUD

Sumber: Data yang diolah dengan menggunakan SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas, koefisien determinasi *R Square* adalah sebesar 0,390 yang artinya bahwa internal audit dan penerapan prinsip *good corporate governance* hanya bisa menjelaskan 39% presentase sumbangan pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan sisanya 61% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian saat ini.

Berdasarkan tabel interpretasi koefisien determinasi menurut Sugiyono (2018:231), nilai K_d dalam penelitian ini sebesar 39% yang terdapat pada interval kedua (20-39,9%) yang berarti bahwa pengaruh antara variabel X yaitu internal audit dan penerapan prinsip GCG terhadap pencegahan *fraud* yaitu rendah.

E. Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing independen secara parsial terhadap variabel dependen yang dilihat dari tingkat signifikansinya. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima sedangkan apabila $> 0,05$ maka H_o diterima (Ghozali, 2013:178). Adapun hasil pengujian secara parsial adalah sebagai berikut

Tabel 4.16
Hasil uji secara parsial

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	12,495	4,634		2,696	,012		
	INTERNAL_AUDIT	,687	,173	,687	3,971	,000	,755	1,325
	PRINSIP_GCG	-,114	,128	-,155	-,894	,379	,755	1,325

a. Dependent Variable: PENCEGAHAN_FRAUD

Sumber: Pengolah data kuesioner dengan SPSS26

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial yang dapat dilihat pada tabel menunjukkan bahwa:

- a. Variabel internal audit memiliki nilai sig. (0,000) < 0,05 artinya bahwa internal audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Dalam tabel diatas juga menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel internal audit adalah 3,971. Sedangkan nilai t_{tabel} adalah 2,051. Hal tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga dapat dikatakan bahwa internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* (H_{a1} diterima).
- b. Variabel penerapan prinsip GCG memiliki nilai sig (0,379) > 0,05 sehingga diketahui pada penelitian ini penerapan prinsip GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Dalam tabel juga menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel penerapan prinsip GCG adalah (-0,894) < 2,051. Hal ini berarti penerapan prinsip GCG memiliki arah yang berlawanan terhadap pencegahan *fraud* (H_{a2} ditolak).

2. Uji F

Dalam pengujian secara simultan apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima sedangkan H_o ditolak. Sebaliknya apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_o diterima sedangkan H_a ditolak. Adapun hasil pengujian secara simultan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 4.17
Hasil pengujian secara simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	51,479	2	25,740	8,645	,001 ^b
	Residual	80,387	27	2,977		
	Total	131,867	29			

a. Dependent Variable: PENCEGAHAN_FRAUD

b. Predictors: (Constant), PRINSIP_GCG, INTERNAL_AUDIT

Sumber: Data kuesioner yang diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan hasil pengujian simultan diatas menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} adalah 25,740 dan F_{tabel} adalah 3,35. Hal ini menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($8,645 > 3,35$) dengan tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa internal audit dan penerapan prinsip GCG terhadap pencegahan *fraud* berpengaruh secara simultan.

4.2.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan mengolah data kuesioner menggunakan program SPSS 26, adapun pembahasan dari hasil pengujian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Internal Audit terhadap Pencegahan *Fraud*

Dalam uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa internal audit berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Pada pengujian parsial (uji t) dalam penelitian ini diperoleh nilai t hitung sebesar 3,971 dan nilai signifikansi (0,000) berada dibawah taraf signifikansi 0,05. Hal ini kemudian menunjukkan hipotesis H_{a1} diterima yang berarti bahwa internal audit berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Semakin baik kinerja internal audit perusahaan maka semakin baik pula pencegahan *fraud* yang dilakukan perusahaan. Semakin efektif fungsi internal audit maka akan semakin mengurangi tingkat kecurangan yang dapat terjadi di lingkungan perusahaan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh internal audit terhadap pencegahan fraud diterima.

Hasil penelitian ini kemudian membuktikan internal audit berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, dimana salah satu upaya pencegahan *fraud* yaitu dengan mengefektifkan fungsi internal audit. Internal audit berperan dalam mengurangi tindakan *fraud* melalui kegiatan pemeriksaan yang senantiasa dilakukan. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Emi Lestari Barus (2017) yang menyatakan bahwa internal audit dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Festi dan Natariasari (2014) yang menyatakan bahwa peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian lain nya yang sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria Margaretha (2019) yang menyatakan bahwa peran auditor internal berpengaruh signifikan terhadap upaya pencegahan dan pendeteksian kecurangan.

2. Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan fraud

Dalam pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Pada pengujian parsial (uji t) untuk variable penerapan prinsip

GCG diperoleh nilai t hitung sebesar $-0,894$ dan nilai signifikansi $0,397$ yang lebih besar dari taraf signifikansi $0,05$ sehingga H_{a2} ditolak yang berarti bahwa penerapan prinsip GCG tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Hasil penelitian yang dilakukan belum berhasil menunjukkan bahwa semakin baik penerapan prinsip GCG pada perusahaan dapat mencegah terjadinya *fraud* dalam perusahaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa pada penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh penerapan prinsip GCG yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Salah satu faktor yang dapat dideteksi melalui jawaban para responden dimana pernyataan-pernyataan dalam indikator prinsip GCG kebanyakan memiliki jawaban dengan skor yang rendah terhadap beberapa pernyataan. Penerapan prinsip GCG juga belum gencar dibicarakan oleh perusahaan sehingga menyebabkan pada penelitian ini penerapan prinsip GCG tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Dari total skor yang telah dihitung oleh peneliti, pernyataan mengenai *homepage* perusahaan mendapatkan skor terendah. Hal tersebut membuktikan bahwa implementasi salah satu prinsip GCG yaitu prinsip transparansi belum dilakukan dengan maksimal. Pernyataan lain yang juga memiliki skor rendah lainnya yaitu mengenai ketersediaan buku panduan *good corporate governance* perusahaan, hal tersebut kemudian membuktikan bahwa implementasi salah satu prinsip GCG yaitu prinsip akuntabilitas belum terlaksana secara maksimal.

Hasil penelitian ini kemudian tidak sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh beberapa peneliti terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh

Sitti Firatul Jannah (2014) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* di BPR Surabaya. Selain penelitian tersebut, penelitian lain yang juga dilakukan oleh Rusman Soleman (2014) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian lain yang juga memiliki hasil yang tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2016) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini mengenai pengaruh internal audit dan penerapan prinsip GCG terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bumi Karsa Makassar, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Internal audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bumi Karsa Makassar. Sedangkan untuk pengaruh penerapan prinsip *good corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini dapat terlihat dari hasil pengujian hipotesis secara parsial
2. Internal audit dan penerapan prinsip *good corporate governance* kemudian secara bersama-sama dapat mempengaruhi pencegahan *fraud*. Hal ini dapat terlihat dari hasil pengujian hipotesis secara simultan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu:

1. Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, ditemukan bahwa internal audit berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini mengindikasikan adanya kinerja yang baik dari internal audit perusahaan dalam mencegah terjadinya *fraud*. Sehingga diharapkan untuk terus dapat meningkatkan kinerjanya. Namun beda halnya dengan penerapan prinsip GCG pada perusahaan.

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG belum dilakukan secara optimal, walaupun dalam beberapa aspek beberapa prinsip GCG sudah tergambar diterapkan oleh perusahaan, hal tersebut tercermin pada jawaban para responden mengenai pernyataan yang menyangkut prinsip GCG.

Pernyataan yang memiliki total skor terendah yang diberikan oleh responden adalah tidak terdapatnya akses yang mudah baik mengenai informasi keuangan dan non-keuangan yang dapat ditampilkan oleh perusahaan pada *homepage* sehingga kedepan diharapkan perusahaan mampu menyediakan akses informasi yang mudah diakses baik bagi karyawan atau masyarakat umum. Pernyataan lain yang juga memiliki total skor rendah dari para responden ialah mengenai pedoman *corporate governance* tertulis yang belum dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya perusahaan diharapkan mampu untuk memiliki pedoman *corporate governance* tersendiri. Terakhir mengenai masih kurangnya pemahaman karyawan mengenai prinsip-prinsip GCG dan penerapannya dilingkungan perusahaan, hal tersebut tercermin dari rendahnya total skor yang diperoleh. Selanjutnya para karyawan diharapkan mampu untuk mengetahui dan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG. Diharapkan perusahaan mampu untuk menerapkan prinsip GCG secara optimal, sehingga manfaat dan tujuan GCG dapat dirasakan baik untuk perusahaan maupun bagi para karyawan.

2. Dalam rangka pengembangan ilmu, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti persoalan yang sama sebaiknya menambahkan beberapa variabel dan unit analisisnya diperluas, tidak hanya diperusahaan swasta tetapi juga dapat dilakukan pada perusahaan Negara.

